

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGHIMPUNAN SAMPAH  
OLEH BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM  
PENGUATAN *CIVIC ENGAGEMENT* MASYARAKAT  
DI DESA JATIMULYO**

**Skripsi**

**Oleh**

**Yolanda Fatima Agustine**

**2213032059**



**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PROGRAM PENGHIMPUNAN SAMPAH OLEH BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PENGUATAN *CIVIC ENGAGEMENT* MASYARAKAT DI DESA JATIMULYO**

**Oleh  
Yolanda Fatima Agustine**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program Penghimpunan Sampah oleh BUMDes Mulyo Jaya di Desa Jatimulyo, menganalisis tingkat keterlibatan masyarakat beserta faktor pendorong dan penghambatnya, serta menjelaskan kontribusi program tersebut dalam penguatan *civic engagement* masyarakat. Program ini dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan lingkungan sekaligus upaya mendorong partisipasi warga dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan desa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pengurus BUMDes, aparatur desa, petugas lapangan, serta masyarakat pengguna layanan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai pelaksanaan program dan dinamika partisipasi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Penghimpunan Sampah berjalan melalui sistem pelayanan yang teratur, koordinasi rutin, serta dukungan pemerintah desa. Partisipasi masyarakat terlihat dari kepatuhan membayar iuran, penyediaan sampah sesuai jadwal, dan keterlibatan dalam kegiatan kebersihan, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan armada, kurangnya sosialisasi, serta perilaku warga yang belum konsisten. Program ini berkontribusi dalam memperkuat *civic engagement* masyarakat melalui peningkatan kepedulian terhadap lingkungan, penguatan gotong royong, tumbuhnya kepercayaan terhadap lembaga desa, serta terbentuknya praktik kewargaan yang lebih aktif dan bertanggung jawab.

**Kata kunci:** BUMDes, Sampah, partisipasi masyarakat, lingkungan, *civic engagement*

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF THE WASTE COLLECTION PROGRAM BY THE VILLAGE-OWNED ENTERPRISE (BUMDes) IN STRENGTHENING CIVIC ENGAGEMENT AT JATIMULYO VILLAGE**

**By**

**Yolanda Fatima Agustine**

*This study aims to describe the implementation of the Waste Collection Program by BUMDes Mulyo Jaya in Jatimulyo Village, analyze the level of community involvement along with its supporting and inhibiting factors, and explain the program's contribution to strengthening civic engagement in the community. The program is implemented as an environmental service as well as an effort to encourage community participation in maintaining cleanliness and environmental sustainability at the village level. This research employed a descriptive qualitative approach with data collected through interviews, observations, and documentation involving BUMDes administrators, village officials, field officers, and community members who use the service. The data were analyzed through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing to obtain a comprehensive understanding of the program implementation and the dynamics of community participation. The results indicate that the Waste Collection Program is implemented through a structured service system, regular coordination, and strong support from the village government. Community participation is reflected in compliance with fee payments, the provision of household waste according to the collection schedule, and involvement in cleanliness activities, although several obstacles remain, such as limited transportation facilities, insufficient information dissemination, and inconsistent community behavior. The program contributes to strengthening civic engagement by increasing environmental awareness, strengthening mutual cooperation, building trust in village institutions, and fostering more active and responsible civic practices.*

**Keywords:** *BUMDes, waste, Society participation, environment, civic engagement*

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGHIMPUNAN SAMPAH  
OLEH BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM  
PENGUATAN *CIVIC ENGAGEMENT* MASYARAKAT  
DI DESA JATIMULYO**

**Oleh**

**YOLANDA FATIMA AGUSTINE**

**(Skripsi)**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA PENDIDIKAN**

**Pada**

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi

**: IMPLEMENTASI PROGRAM PENGHIMPUNAN  
SAMPAH OLEH BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)  
DALAM PENGUATAN *CIVIC ENGAGEMENT*  
MASYARAKAT DI DESA JATIMULYO**

Nama Mahasiswa

**: Yolanda Fatima Agustine**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2213032059

Program Studi

**: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan

**: Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**

Fakultas

**: Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

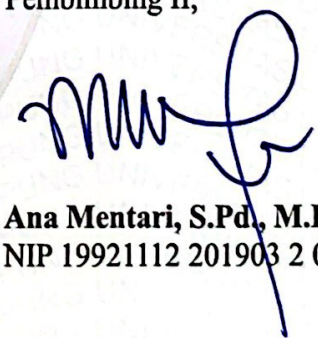
**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

Pembimbing I,

  
**Dr. Yunisca Nuralisa, M.Pd.**  
NIP. 19870602 200812 2 001

Pembimbing II,

  
**Ana Mentari, S.Pd., M.Pd.**  
NIP. 19921112 201903 2 026

**2. Mengetahui**

Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu  
Pengetahuan Sosial

  
**Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.**  
NIP. 19741108 200501 1 003

Koordinator Program Studi  
Pendidikan PKn

  
**Dr. Yunisca Nuralisa, M.Pd.**  
NIP. 19870602 200812 2 001

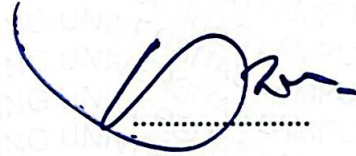


## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

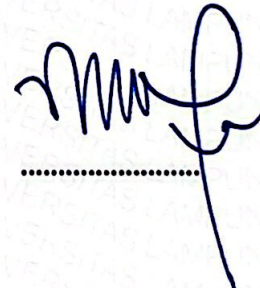
Ketua

: Dr. Yunisca Nuralisa, M.Pd.



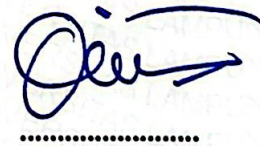
Sekretaris

: Ana Mentari, S.Pd., M.Pd.



Penguji

Bukan Pembimbing : Devi Sutrisno Putri, S.Pd., M.Pd.



Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd.

NIP 19870504 201404 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Januari 2026

## SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Yolanda Fatima Agustine  
NPM : 2213032059  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Alamat : Dusun II Jatimulyo, Lampung Selatan

Menyatakan skripsi yang berjudul “Implementasi Program Penghimpunan Sampah oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Penguatan *Civic Engagement* Masyarakat di Desa Jatimulyo” tersebut adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber yang disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat, dan apabila dikemudian hari terdapat pernyataan yang tidak benar, maka saya sanggup dituntut berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan akademik yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 21 Januari 2026



Yolanda Fatima Agustine

NPM. 2213032059

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Yolanda Fatima Agustine, lahir di Bandar Lampung pada tanggal



05 Agustus 2003 yang merupakan putri bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Ajron Karim dan Ibu Ana Jemi.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 5 Jatimulyo di selesaikan pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama Negeri 19 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2021. Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Penulis menjadi anggota bidang Pendidikan dan PSDM Fordika Universitas Lampung dari tahun 2022-2024.

Penulis melaksanakan KKN pada bulan Januari tahun 2024 di desa Way Dente, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang dan melaksanakan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dente Teladas, pada bulan Januari-Februari tahun 2025.



## **MOTTO**

*“If you truly believe in yourself, everything become possible”*

(Yolanda Fatima Agustine)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan Mengucap Syukur Kepada Tuhan yang Maha Esa, kupersembahkan karya kecil ini sebagai tanda bukti dan cinta kasih kepada :

“kepada orang tua tercinta Bapak Ajron Karim dan Ibu Ana Jemi yang telah merawat, membimbing, dan melindungi dengan tulus serta penuh keikhlasan dengan segala kasih sayang dan cintanya. Ayah, terima kasih telah mengajarkan arti tanggung jawab dan keteguhan. Mama, terima kasih telah menanamkan kesabaran dan ketulusan dalam setiap langkahku. Tidak ada kata yang mampu menyamai besarnya cinta dan pengorbanan kalian. Semoga keberhasilan kecil ini menjadi bagian dari kebahagiaan kalian, sebagaimana kalian telah menjadi alasan kekuatanku sampai hari ini. Semoga Allah membalas dengan pahala yang sempurna atas segala kebaikan dan cinta yang kalian berikan.

Serta

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

## SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan anugerahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Program Penghimpunan Sampah oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Penguatan *Civic Engagement* Masyarakat di Desa Jatimulyo”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung. terselesaikan skripsi ini tidak pernah terlepas dari arahan dan bimbingan, saran serta bantuan moral maupun spiritual serta arahan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga segala kesulitan yang dialami dapat terlewati dengan baik. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.
3. Bapak Bambang Riadi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd. M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Dedy Miswar, S.Si.,M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.

6. Ibu Dr. Yunisca Nuralisa, M.Pd., selaku Koordinator program studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dan selaku pembimbing I terima kasih banyak atas masukan, saran dan bimbingan yang telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan terima kasih atas segala motivasi yang telah diberikan.
7. Ibu Ana Mentari, S.Pd., M.Pd, selaku pembimbing II terima kasih banyak atas saran, arahan dan masukan serta telah membimbing dengan penuh kesabaran, memberikan motivasi dan dukungan sepenuhnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Devi Sutrisno Putri, S.Pd., M.Pd, selaku Pembahas I terima kasih banyak atas saran, masukan dan bimbingan yang telah diberikan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd, selaku Pembahas II terima kasih banyak atas segala saran, masukan yang telah diberikan sampai skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Bapak Susilo, S.Pd., M.Pd, selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam masa perkuliahan dikelas, memberikan semangat, dukungan dan nasihat yang membuat penulis merasakan orangtua kedua di bangku perkuliahan.
11. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan, saran, serta segala bantuan yang diberikan.
12. Staff Program studi PPKn Universitas Lampung yang telah membantu peneliti selama mengadakan penelitian.
13. Bapak Sumardi, S.E selaku kepala desa Jatimulyo sekaligus Komisaris BUMDes Mulyo Jaya telah memberikan izin penelitian serta senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
14. Bapak Suherwan Selaku Direktur atau Ketua BUMDes Mulyo Jaya desa Jatimulyo yang telah memberikan izin serta senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian.

15. Aparatur dan Staf Kantor Balai Desa Jatimulyo yang telah memberikan izin penelitian, membantu proses pengumpulan data, serta menyediakan informasi dan dokumen yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung. Terima kasih atas kerja sama, waktu, dan keterbukaannya sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
16. Staff BUMDes Mulyo Jaya, terutama Ibu Elvina Dinda, S. Pd. yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi, wawasan, serta panduan yang sangat berarti selama proses penelitian.
17. Masyarakat Desa Jatimulyo yang telah memberikan kesempatan, ruang, dan penerimaan yang hangat selama proses penelitian berlangsung.
18. Teristimewa Bapak Ajron Karim dan Ibu Ana Jemi selaku orang tua yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material, serta selalu memberikan doa yang tiada henti untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
19. Teristimewa Kakak ku tersayang Carina Aurelia, S.Pd. dan abang ku tersayang Muhammad Rezza Pasya yang selalu menjadi tempat berbagi cerita, nasihat, dan semangat dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis.
20. Teristimewa Sahabat ku Elsa Aura Savana, Tara Marza Citra Dewi, dan Anissa Salsabilla Azzahra, yang selalu kebersamaian penulis memberikan dukungan dalam penyelesaian penulis.
21. Teruntuk Seseorang yang hadir dalam perjalanan ini, sebagai sumber semangat dan ketenangan. Terima kasih atas perhatian, dorongan, dan kesabarannya dalam menemani setiap proses, baik pada saat penulis merasa yakin maupun ketika keraguan sempat hadir. Kehadirannya menjadi energi baik yang membuat penulis mampu tetap melangkah dengan hati yang mantap. Doa serta kebaikan yang diberikan menjadi bagian berarti dalam penyelesaian skripsi ini, semoga kita berjodoh.
22. Keluarga Besar KKN Desa Way Dente serta masyarakat Desa Dente Teladas terimakasih atas kisah 40 hari yang selalu menjadi rindu dan kenangan yang menyenangkan.
23. Teman-teman PPKn angkatan 2022 khususnya kelas B, atas kebersamaannya selama ini.



24. Semua pihak yang tidak bagi penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga ketulusan bapak, ibu serta rekan-rekan dapat dibalaskan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya. Akhirnya penulis berharap semoga dengan kesederhanaannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

**Bandar Lampung, 21 Januari 2026**

**Penulis**

**Yolanda Fatima Agustine**

**NPM. 2213032059**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Program Penghimpunan Sampah Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Penguatan *Civic Engagement* Masyarakat di Desa Jatimulyo” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT selalu memberkahi langkah kita dan memberikan kesuksesan dimasa mendatang serta semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

**Bandar Lampung, 21 Januari 2026**

**Penulis**

**Yolanda Fatima Agustine**

**NPM. 2213032059**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Pertanyaan Penelitian .....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan/Manfaat Penelitian.....	9
1. Kegunaan/Manfaat Penelitian Teoritis .....	9
2. Kegunaan/Manfaat Penelitian Praktis .....	10
F. Ruang Lingkup Penelitian .....	10
1. Ruang Lingkup Ilmu.....	10
2. Ruang Lingkup Objek Penelitian .....	10
3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian.....	11
4. Ruang Lingkup Tempat Penelitian .....	11
5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian.....	11
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Deskripsi Teori .....	12
1. Tinjauan Tentang Lingkungan.....	12
2. Tinjauan Tentang Program Desa .....	17
3. Tinjauan Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	23
4. Tinjauan Tentang <i>Civic Engagement</i> Masyarakat di desa .....	31

B. Penelitian yang Relevan .....	39
C. Kerangka Pikir .....	42
<b>III. METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian .....	46
C. Objek Penelitian .....	47
D. Informan dan Unit Analisis .....	47
1. Informan.....	47
2. Unit Analisis.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
1. Wawancara .....	49
2. Observasi .....	50
3. Dokumentasi .....	51
F. Uji Keabsahan Data.....	51
1. Triangulasi .....	52
2. <i>Member Check</i> .....	52
3. Ketekunan Pengamatan ( <i>Persistent Observation</i> ).....	53
4. <i>Audit Trail</i> .....	55
G. Teknik Analisis Data .....	56
1. Reduksi Data ( <i>Data Reduction</i> ) .....	56
2. Penyajian Data ( <i>Data Display</i> ) .....	57
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi ( <i>Conclusion Drawing and Verification</i> ) .....	58
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. Langkah-Langkah Penelitian .....	60
1. Persiapan Pengajuan Judul.....	60
2. Penelitian Pendahuluan.....	60
3. Pengajuan Rencana Penelitian .....	61
4. Penyusunan Alat Pengumpulan Data.....	61
5. Pelaksanaan Penelitian.....	62
B. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian.....	62
1. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	62
2. Visi dan Misi .....	64
C. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mulyo Jaya .....	65
1. Sejarah berdirinya BUMDes .....	65
2. Struktur organisasi dan pembagian tugas .....	67
3. Program Penghimpunan Sampah .....	68
D. Deskripsi Hasil Penelitian.....	68
1. Penyajian Data .....	70
E. Pembahasan .....	135
1. Implementasi Program Penghimpunan Sampah oleh BUMDes Mulyo Jaya .....	136

2. Penguatan <i>Civic Engagement</i> dalam Program Penghimpunan Sampah oleh BUMDes .....	140
F. Temuan Penelitian .....	148
G. Faktor Pendukung dan Penghambat .....	151
H. Keunikan Penelitian .....	152
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>154</b>
A. Kesimpulan .....	154
B. Saran.....	155
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>157</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>162</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Grafik Jumlah sampah tahun 2022 .....	2
2.1 Kerangka Pikir .....	43
3.1 Alur analisis data menurut Miles dan Huberman .....	59
4. 1 Struktur Organisasi BUMDes Mulyo Jaya.....	67
4. 2 Mobil <i>Pick-Up</i> kecil sedang mengangkut sampah dari rumah warga setiap hari. ....	72
4. 3 Koordinasi antar petugas dan anggota BUMDes.....	75
4. 4 Mobil <i>Pick-Up</i> kecil sedang mengangkut sampah dari rumah warga.....	77
4. 5 Armada yang digunakan oleh Petugas BUMDes.....	79
4. 6 Kendala armada pengangkutan.....	81
4. 7 Foto Wawancara dengan Direktur atau Ketua BUMDes Mulyo Jaya .....	84
4. 8 Kegiatan rapat monitoring dan evaluasi dikantor BUMDes Mulyo Jaya .....	86
4. 9 Wawancara dengan Kepala Desa Jatimulyo .....	88
4. 10 Banner dilarang buang sampah sembarangan.....	90
4. 11 Rapat MUSRENBANGDes .....	93
4. 12 Jumat Bersih Desa Jatimulyo .....	95
4. 13 Mobil <i>dump truck</i> milik BUMDes .....	98
4. 14 Wawancara dengan Petugas Lapangan BUMDes .....	100
4. 15 Sosialisasi mengenai BUMDes.....	102
4. 16 Wawancara dengan Masyarakat desa Jatimulyo .....	106
4. 17 Materi Sosialisasi .....	108
4. 18 Wawancara dengan Masyarakat Desa Jatimulyo .....	111
4. 19 Warga membantu Petugas Lapangan BUMDes mengangkut Sampah Ke mobil .....	115
4. 20 Sampah Sembarangan .....	117
4. 21 Masyarakat bergotong royong memperbaiki Jalan .....	122
4. 22 Petugas Lapangan BUMDes sedang mengatur sampah di <i>dump truck</i> .....	125
4. 23 Lingkungan Bersih Desa Jatimulyo .....	130

## I. PENDAHULUAN

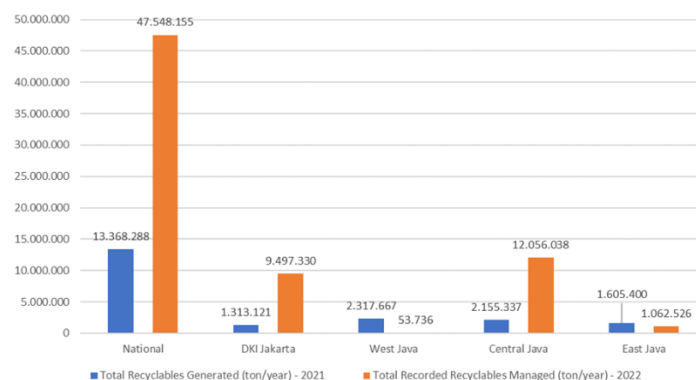
### A. Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan menjadi agenda global yang diurusutamakan melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Salah satu fokus utama dalam agenda tersebut adalah perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab serta peningkatan peran serta masyarakat. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, pelaksanaan SDGs bukan hanya menjadi komitmen internasional, tetapi juga tantangan nyata dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan, terutama dalam konteks lokal seperti pengelolaan sampah.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak nomor 4 di dunia juga sebagai negara berkembang menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam aspek lingkungan hidup dan partisipasi masyarakat. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi di berbagai wilayah adalah pengelolaan sampah yang belum optimal. Menurut Sailutullah (2022) dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya manusia akan menghasilkan buangan berupa sampah, kondisi ini dapat diperburuk dengan meningkatkan jumlah penduduk baik dari kelahiran ataupun perpindahan masuk suatu penduduk di sebuah wilayah atau daerah. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan jutaan ton sampah setiap tahunnya, namun sebagian besar belum dikelola secara tepat, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan pencemaran lingkungan, tetapi juga menunjukkan adanya persoalan mendasar

dalam hal kesadaran dan keterlibatan warga dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan secara kolektif.

Menurut data SIPSN tahun 2023, jumlah timbunan sampah nasional mencapai 56,63 juta ton, namun hanya sekitar 39 % (22,09 juta ton) yang terkelola secara layak; sisanya sekitar 61 % (34,54 juta ton) masih belum terkelola dan berisiko mencemari lingkungan. Di sisi lain, sumber lain menyampaikan bahwa capaian pengelolaan mencapai 66,28 %, menyisakan 33,72 % (sekitar 23,6 juta ton) sampah belum tertangani secara memadai. Data SIPSN juga mencatat performa kinerja di 318–362 kabupaten/kota yang menyumbangkan data capaian penanganan sampah nasional secara agregat. Komposisi sampah di Indonesia didominasi oleh sampah organik, terutama sisa makanan yang mencapai sekitar 39–40 %, diikuti oleh sampah plastik sebesar 18–19 %, kayu/ranting (12–13 %), serta sampah kertas, logam, kain dan bahan lainnya. Secara sumber, sekitar 60 % berasal dari rumah tangga, pasar/tradisional sekitar 11–15 %, dan sisanya berasal dari lingkungan perkantoran, kawasan publik, maupun industri kecil.



Gambar 1.1 Grafik Jumlah sampah tahun 2022  
(Sumber. SIPSN-KLHK 2022)

Grafik yang ditampilkan menunjukkan perbandingan antara total timbunan sampah domestik yang dihasilkan dan jumlah sampah yang berhasil ditangani secara sistematis melalui berbagai fasilitas pengelolaan seperti TPA, TPS 3R, bank sampah, dan komposter di tingkat kabupaten/kota. Visualisasi ini menggambarkan gap signifikan antara produksi limbah dan pengelolannya secara efektif, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki pelayanan pengelolaan sampah terpadu.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, pemerintah Indonesia sebenarnya telah merancang berbagai kebijakan dan strategi nasional untuk menanggulangi persoalan sampah. Salah satunya adalah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang menargetkan pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025. Kebijakan ini menekankan pentingnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan prinsip pengurangan dari sumber (*reduce*), pemanfaatan kembali (*reuse*), dan daur ulang (*recycle*), atau dikenal dengan konsep 3R. Pemerintah pusat juga mendorong pemerintah daerah, termasuk sampai ke tingkat desa, untuk mengambil peran aktif dalam pengelolaan sampah melalui pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas. Dengan kata lain, penyelesaian masalah sampah tidak hanya bergantung pada infrastruktur dan teknologi, tetapi juga menuntut keterlibatan langsung dari masyarakat akar rumput yang hidup berdampingan dengan sampah setiap hari.

Masalah sampah yang terus berulang menjadi alasan utama pemerintah pusat menetapkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Indonesia. Undang-undang ini mewajibkan seluruh kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk melaksanakannya. Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang disesuaikan dengan situasi serta kondisi lokal masing-masing. Perumusan kebijakan tersebut tetap mengacu pada arah kebijakan nasional yang telah ditetapkan. Dengan adanya kewenangan ini, diharapkan daerah mampu merancang solusi penanganan sampah melalui kebijakan atau program yang selaras dengan karakteristik dan kebutuhan wilayahnya, termasuk ke desa-desa. Upaya ini sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan 11 tentang “Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan” serta Tujuan 12 mengenai “Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab”, yang mendorong setiap negara untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, partisipatif, dan berbasis kearifan lokal. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat lokal, termasuk melalui pemberdayaan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menjadi langkah konkret dalam memperkuat pembangunan berkelanjutan dari akar rumput.

Di tengah tantangan tersebut, desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pembangunan berbasis masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta menyelenggarakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Desa bukan hanya sebagai entitas administratif, tetapi juga sebagai ruang sosial yang dinamis, tempat nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan partisipasi warga tumbuh dan berkembang. Melalui pendekatan pembangunan berbasis partisipasi, desa didorong untuk menjadi agen perubahan dalam berbagai bidang, termasuk dalam pengelolaan lingkungan. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada desa untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri. Otonomi desa ini tidak hanya mencerminkan desentralisasi administrasi, tetapi juga membuka ruang seluas-luasnya bagi desa untuk menggali potensi lokal dan merespons persoalan-persoalan yang dihadapi oleh warganya secara partisipatif. Dalam konteks pengelolaan sampah, desa memiliki kapasitas untuk menyusun kebijakan, mengalokasikan anggaran, serta menggerakkan masyarakat agar terlibat aktif dalam program-program lingkungan yang berbasis kebutuhan lokal dan budaya setempat.

Dalam pelaksanaan otonomi desa, berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah dirancang oleh pemerintah desa untuk menjawab persoalan-persoalan lokal, termasuk dalam bidang lingkungan. Program-program tersebut biasanya disusun berdasarkan hasil musyawarah desa dan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup warga melalui pendekatan partisipatif. Salah satu bentuk program yang berkembang di banyak desa adalah kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti penyediaan tempat penampungan sementara, pelatihan pengolahan sampah organik, pembentukan kelompok sadar lingkungan, hingga pengumpulan iuran kebersihan. Program-program ini merupakan upaya konkret desa untuk tidak hanya mengelola limbah,



tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kesehatan publik.

Sebagai bagian dari strategi pemberdayaan dan kemandirian desa, banyak pemerintah desa membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga ekonomi yang dikelola oleh desa bersama masyarakat. BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai penggerak roda perekonomian lokal, tetapi juga menjadi sarana bagi desa untuk mengelola berbagai unit usaha yang mendukung pelayanan sosial, termasuk di dalamnya pengelolaan sampah. Dengan struktur organisasi yang fleksibel dan kedekatan dengan warga, BUMDes memiliki keunggulan dalam menjangkau kebutuhan masyarakat secara langsung serta mengembangkan inovasi yang sesuai dengan karakteristik lokal. Dalam konteks pengelolaan sampah, BUMDes dapat menjadi pelaksana teknis program penghimpunan sampah rumah tangga, pengangkutan, pemilahan, hingga pengolahan skala kecil yang berbasis komunitas. Keterlibatan BUMDes dalam bidang ini tidak hanya berorientasi pada pelayanan, tetapi juga mendorong lahirnya model pembangunan sosial yang berbasis kewirausahaan dan kolaborasi warga.

Salah satu contoh nyata dari penerapan pengelolaan sampah berbasis desa adalah yang dilakukan oleh BUMDes Mulyo Jaya di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. BUMDes yang telah berdiri sejak tahun 2016 ini menginisiasi Program Penghimpunan Sampah Rumah Tangga sebagai program unggulan dengan bentuk pelayanan kepada warga sekaligus sebagai upaya menciptakan lingkungan desa yang bersih dan sehat. Program ini dijalankan dengan sistem berlangganan, di mana warga membayar iuran bulanan untuk mendapatkan layanan pengangkutan sampah secara rutin. Sampah yang dikumpulkan ke dalam truk pengangkut sampah kemudian dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dikelola oleh Pemerintah kabupaten Lampung Selatan. Program ini juga diharapkan dapat mengedukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan serta mendorong perubahan perilaku dalam mengelola limbah rumah tangga secara lebih bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti pada 16 Mei 2025 dalam pelaksanaannya, partisipasi masyarakat Desa Jatimulyo terhadap Program Penghimpunan Sampah oleh BUMDes menunjukkan respons yang cukup baik. Sejumlah warga telah secara rutin berkontribusi melalui pembayaran iuran dan penyediaan sampah rumah tangga untuk diangkut. Antusiasme ini mencerminkan adanya kesadaran dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Meskipun demikian, partisipasi tersebut belum sepenuhnya merata di seluruh lapisan masyarakat. Masih terdapat sebagian warga yang belum sepenuhnya terlibat aktif, yang kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan informasi, kebiasaan lama, atau faktor ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa program memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan melalui pendekatan yang lebih inklusif dan edukatif.

*Civic engagement* masyarakat Desa Jatimulyo dalam program penghimpunan sampah ini patut diapresiasi, karena telah menunjukkan adanya kesadaran bersama terhadap pentingnya menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Keterlibatan warga yang telah berjalan selama ini menjadi modal sosial yang kuat bagi desa dalam membangun budaya partisipatif. Namun, untuk mencapai efektivitas yang lebih luas, masih diperlukan upaya penguatan berupa peningkatan komunikasi, edukasi, serta pendekatan berbasis komunitas agar seluruh warga dapat merasa terlibat dan memiliki peran. Dalam konteks pengelolaan sampah, keterlibatan warga bukan hanya diukur dari kepatuhan membayar iuran atau menyediakan sampah, tetapi juga dari kesadaran akan pentingnya hidup dalam lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Ketika sebagian warga bersikap acuh atau pasif terhadap program lingkungan yang sudah difasilitasi oleh desa, hal ini menunjukkan belum terbentuknya budaya kolektif yang mendukung nilai-nilai kepedulian, tanggung jawab, dan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Penguatan *civic engagement* menjadi penting karena ia merupakan fondasi bagi terwujudnya pembangunan desa yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Ketika warga merasa memiliki tanggung jawab bersama atas permasalahan di lingkungannya, maka mereka akan lebih terdorong untuk terlibat dalam berbagai program desa, termasuk pengelolaan sampah. Lebih dari sekadar keterlibatan

fisik, *civic engagement* juga mencakup aspek kesadaran, solidaritas sosial, kepercayaan terhadap institusi lokal, serta kemampuan warga untuk berkolaborasi. Dalam hal ini, keberhasilan program penghimpunan sampah tidak hanya bergantung pada kelengkapan teknis atau administrasi dari BUMDes, melainkan sangat ditentukan oleh seberapa kuat warga desa merasa terhubung dan terdorong untuk ikut ambil bagian dalam menjaga lingkungan secara kolektif.

Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam program penghimpunan sampah bukan sekadar persoalan administratif atau teknis semata, melainkan menyangkut dimensi sosial yang lebih dalam. Dibutuhkan pemahaman yang utuh mengenai bagaimana warga desa memandang keberadaan program tersebut, apa yang mereka rasakan sebagai hambatan atau dorongan, serta bagaimana hubungan antara lembaga desa seperti BUMDes dengan masyarakat terbentuk dan dijalankan dalam keseharian. Dinamika ini tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat yang memengaruhi cara mereka merespons program yang ditawarkan. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih jauh pengalaman, pandangan, serta interaksi yang muncul dalam konteks pelaksanaan program tersebut agar dapat ditemukan akar persoalan dan potensi penguatan yang lebih tepat sasaran.

Berangkat dari fenomena-fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya dalam penelitian ini maka peneliti mengkaji dan mendeskripsikan mengenai Program Penghimpunan sampah oleh Badan usaha Milik Desa Jatimulyo untuk mengetahui bagaimana program tersebut berkontribusi terhadap penguatan *civic engagement* masyarakat dan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika pelaksanaan program di tingkat desa, termasuk faktor-faktor yang mendorong atau menghambat partisipasi warga. Maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul : **"Implementasi Program Penghimpunan Sampah Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Penguatan Civic Engagement Masyarakat di Desa Jatimulyo"**.

## B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Penghimpunan Sampah oleh BUMDes Mulyo Jaya di Desa Jatimulyo. Fokus penelitian ini diarahkan untuk menggambarkan bagaimana program tersebut dijalankan serta bagaimana program mampu mendorong keterlibatan warga dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun fokus penelitian dibatasi dalam dua indikator berikut:

### 1. Implementasi Program Penghimpunan Sampah oleh BUMDes Mulyo Jaya

Penelitian ini menelaah bagaimana proses pelaksanaan Program Penghimpunan Sampah dijalankan oleh BUMDes, mulai dari mekanisme pengangkutan sampah, peran petugas, jadwal kegiatan, hingga bentuk pelayanan kepada masyarakat. Fokus ini melihat sejauh mana program mampu berjalan secara teratur, bagaimana koordinasi antara pengurus dan pelaksana dilakukan, serta bagaimana kesiapan sarana dan prasarana mendukung jalannya program. Selain itu, penelitian juga memperhatikan bagaimana masyarakat mematuhi ketentuan pengumpulan sampah yang telah ditetapkan.

### 2. Penguatan *Civic Engagement* dalam Program Penghimpunan Sampah

Penelitian ini juga memfokuskan diri pada bagaimana Program Penghimpunan Sampah berkontribusi dalam meningkatkan *civic engagement* masyarakat, seperti partisipasi warga, kepedulian terhadap lingkungan, kerja sama antarwarga, serta kemauan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan desa. Fokus ini menelaah bentuk keterlibatan yang muncul selama program berlangsung, mulai dari peran masyarakat dalam penyediaan sampah pada waktu yang ditentukan, interaksi mereka dengan petugas BUMDes, hingga kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, penelitian juga melihat bagaimana program mendorong rasa tanggung jawab sosial dan kedisiplinan warga dalam kehidupan bermasyarakat.

### C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk implementasi Program Penghimpunan Sampah oleh BUMDes dari aspek partisipasi warga, sistem layanan, dan dukungan kelembagaan desa?
2. Bagaimana penguatan *civic engagement* masyarakat melalui Program Penghimpunan Sampah oleh BUMDes Mulyo Jaya?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk implementasi Program Penghimpunan Sampah oleh BUMDes, khususnya dari aspek partisipasi warga, sistem layanan, serta dukungan kelembagaan desa dalam pelaksanaan program tersebut.
2. Untuk menganalisis penguatan *civic engagement* masyarakat melalui pelaksanaan Program Penghimpunan Sampah oleh BUMDes Mulyo Jaya di Desa Jatimulyo.

### E. Kegunaan/Manfaat Penelitian

#### 1. Kegunaan/Manfaat Penelitian Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya dalam memahami dinamika *civic engagement* masyarakat di tingkat desa. Dengan mengkaji implementasi Program Penghimpunan Sampah oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan memperkaya perspektif teoritis tentang peran institusi lokal dalam membangun partisipasi warga dalam isu-isu lingkungan dan sosial. Selain itu, temuan penelitian ini dapat memperkuat pemahaman tentang keterkaitan antara pengelolaan sampah berbasis komunitas dengan tumbuhnya kepedulian, kolaborasi, dan tanggung jawab warga negara dalam konteks pembangunan desa berkelanjutan.

## 2. Kegunaan/Manfaat Penelitian Praktis

### a. Bagi Pemerintah Desa dan BUMDes

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam evaluasi dan pengembangan Program Penghimpunan Sampah oleh BUMDes agar lebih efektif, partisipatif, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Desa Jatimulyo. Penelitian ini juga dapat membantu dalam merumuskan strategi peningkatan partisipasi warga serta penguatan hubungan kelembagaan antara desa dan masyarakat.

### b. Bagi Masyarakat Desa Jatimulyo

Penelitian ini dapat mendorong kesadaran kolektif warga terhadap pentingnya keterlibatan dalam pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab kewarganegaraan. Melalui refleksi terhadap program yang berjalan, masyarakat diharapkan terdorong untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan membangun budaya gotong royong.

### c. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat menjadi rujukan awal bagi kajian lanjutan terkait implementasi program desa dan *civic engagement* masyarakat, khususnya dalam konteks pembangunan berbasis lingkungan. Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk pengembangan model pendidikan kewarganegaraan yang lebih kontekstual dan aplikatif.

## F. Ruang Lingkup Penelitian

### 1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu Pendidikan Hukum dan Kemasyarakatan karena mengkaji terkait dengan *Civic Engagement* atau Keterlibatan warga negara.

### 2. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah pengaruh program penghimpunan sampah oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap *Civic Engagement* Masyarakat

**3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian**

Warga Desa Jatimulyo yang mengikuti Program Penghimpunan Sampah oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jatimulyo.

**4. Ruang Lingkup Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah administratif desa Jatimulyo yang beralamatkan di Desa Jatimulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan

**5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan sejak di keluarkannya Surat Izin Penelitian Pendahuluan pada tanggal 9 Mei 2025 dengan Nomor 43644/UN.26.13/PN.01.00/2025.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Deskripsi Teori**

#### **1. Tinjauan Tentang Lingkungan**

##### **a. Pengertian Lingkungan**

Lingkungan didefinisikan sebagai keseluruhan komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi menyokong kehidupan manusia dan makhluk lain. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan makhluk lainnya.

Lingkungan merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen alam dan non-alam, baik yang hidup (biotik) maupun tidak hidup (abiotik), yang saling berinteraksi dan memengaruhi keberlangsungan hidup makhluk hidup, termasuk manusia. Lingkungan tidak hanya terbatas pada alam fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang saling berhubungan dalam membentuk sebuah ekosistem yang seimbang dan berkelanjutan.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan lingkungan hidup sebagai “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.” Definisi ini



menunjukkan bahwa lingkungan hidup adalah sebuah sistem terpadu yang mencakup faktor alam, manusia, dan perilakunya.

Menurut J. McNaughton dan Larry L. Wolf (dalam buku *Environmental Science*), lingkungan diartikan sebagai keseluruhan kondisi eksternal serta pengaruh-pengaruh yang memengaruhi kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan organisme dalam suatu sistem ekologis. Lingkungan ini mencakup dua komponen utama, yakni faktor biotik, seperti tumbuhan, hewan, manusia, serta mikroorganisme; dan faktor abiotik, seperti cahaya, suhu, kelembapan, udara, air, dan struktur tanah. Keduanya tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi secara kompleks dan saling membentuk satu sistem ekologis yang dinamis. McNaughton dan Wolf menekankan bahwa lingkungan bukan sekadar latar tempat berlangsungnya kehidupan, melainkan merupakan sistem yang aktif dan saling terhubung, di mana perubahan pada satu komponen akan menimbulkan konsekuensi terhadap komponen lainnya. Dalam hal ini, mereka memperkenalkan konsep interdependensi ekologis, yakni ketergantungan antarspesies dalam suatu ekosistem yang ditopang oleh keteraturan siklus energi, daur materi, dan jaringan trofik. Gangguan terhadap salah satu unsur, baik biotik maupun abiotik, dapat memicu ketidakseimbangan ekologis, yang dalam jangka panjang berdampak pada stabilitas ekosistem secara keseluruhan (Ripple, et al., 2016).

Lebih lanjut, keduanya juga menggarisbawahi peran manusia sebagai agen ekologis yang memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan lingkungan. Aktivitas manusia seperti deforestasi, urbanisasi, eksploitasi sumber daya alam, dan pencemaran tidak hanya mengubah struktur fisik lingkungan, tetapi juga merombak fungsi-fungsi ekologis dasar yang menopang kehidupan. Oleh karena itu, pemahaman tentang lingkungan menurut McNaughton dan Wolf bukan hanya bersifat biologis atau fisik, tetapi juga mengandung dimensi etika dan tanggung jawab sosial. Manusia memiliki peran sentral, baik sebagai bagian dari ekosistem maupun sebagai pengelola yang menentukan arah keberlanjutan lingkungan hidup itu sendiri.

Lingkungan dalam konteks masyarakat desa memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi ekologis dan dimensi sosial. Dimensi ekologis mencakup keberadaan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara, sementara dimensi sosial mencakup nilai-nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat dalam berinteraksi dengan alam. Oleh karena itu, memahami lingkungan tidak hanya sekadar mempelajari unsur-unsur alamiah, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat memperlakukan dan mengelola sumber daya secara berkelanjutan. lingkungan adalah salah satu dari tiga pilar utama dalam konsep *sustainable development*, selain aspek ekonomi dan sosial. Ketiga pilar ini harus berjalan secara seimbang agar pembangunan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan sosial jangka panjang. Kerusakan lingkungan, jika dibiarkan, tidak hanya berdampak pada terganggunya fungsi alam, tetapi juga akan menghambat proses pembangunan itu sendiri. Dalam pendidikan lingkungan menekankan bahwa lingkungan adalah media sekaligus objek belajar yang harus dikenalkan kepada masyarakat sejak dini. Penguatan pemahaman terhadap lingkungan akan membantu membangun sikap bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian alam, terutama di wilayah yang sangat bergantung pada sumber daya alam seperti pedesaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lingkungan bukan hanya ruang tempat hidup manusia dan makhluk lain, melainkan juga sistem yang kompleks dan dinamis, yang terdiri atas berbagai unsur saling terkait. Pemahaman yang utuh terhadap lingkungan sangat penting dalam mendukung keberhasilan program-program berbasis masyarakat, termasuk program pengelolaan sampah oleh desa, karena keberhasilan program tersebut sangat ditentukan oleh cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap lingkungannya.

#### **b. Kesadaran Lingkungan**

Kesadaran lingkungan (*environmental awareness*) merujuk pada pengetahuan, sikap, dan perilaku individu atau komunitas terhadap

pentingnya menjaga kualitas lingkungan. Studi oleh Munawar, Heryanti & Miarsyah (2019) menunjukkan adanya hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan lingkungan dan kesadaran lingkungan di kalangan siswa sekolah Adiwiyata di Indonesia (Utami & Surtikanti, 2023). Literatur memperlihatkan bahwa pendekatan pendidikan lingkungan melalui proyek berbasis komunitas dan metode experiential learning, seperti *learning by doing*, efektif meningkatkan literasi dan kesadaran lingkungan siswa (Nurhakim & Anita, 2024). Misalnya, pendekatan ini mendukung pemahaman terhadap pentingnya kebersihan sekolah dan lingkungan sekitarnya serta membentuk karakter peduli lingkungan sejak dini (Halida, Aswat, Putri, Dharmayanti, & Jamain, 2024).

Kesadaran lingkungan merupakan salah satu bentuk kesadaran sosial yang muncul dari pemahaman individu atau kelompok terhadap pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Secara konseptual, kesadaran lingkungan (*environmental awareness*) tidak hanya mencakup pengetahuan tentang lingkungan, tetapi juga mencakup sikap, nilai, dan tindakan nyata yang menunjukkan kepedulian terhadap keberlanjutan alam.

Menurut Hines, Hungerford, dan Tomera (1987) dalam *Model of Responsible Environmental Behavior*, kesadaran lingkungan merupakan salah satu komponen penting dalam pembentukan perilaku ramah lingkungan. Model ini menjelaskan bahwa seseorang akan menunjukkan perilaku lingkungan yang bertanggung jawab jika memiliki pengetahuan tentang isu-isu lingkungan, keterampilan dalam pemecahan masalah lingkungan, serta memiliki sikap dan intensi (niat) yang kuat terhadap pelestarian lingkungan (Rahmawati, 2016). Lebih lanjut, Bamberg dan Möser (2007) melalui pendekatan *Theory of Planned Behavior (TPB)* mengintegrasikan variabel kesadaran lingkungan sebagai faktor yang memengaruhi sikap dan niat seseorang untuk bertindak pro-lingkungan. Dalam teori ini, kesadaran terhadap akibat negatif dari perilaku merusak lingkungan berkontribusi pada munculnya sikap positif terhadap tindakan

pelestarian, seperti daur ulang, penghematan energi, dan pengelolaan sampah (Putra R. P., 2019).

Menurut Schultz (2000), kesadaran lingkungan berkembang melalui tiga orientasi nilai utama (Lestari, 2023), yaitu:

1. *Egoistic orientation* yaitu ketika individu peduli terhadap lingkungan karena merasa akan terdampak secara pribadi.
2. *Altruistic orientation* yaitu ketika individu peduli karena memikirkan kesejahteraan orang lain.
3. *Biospheric orientation* yaitu ketika individu peduli terhadap lingkungan karena menilai pentingnya seluruh ekosistem secara menyeluruh.

Pendekatan ini relevan dalam memahami variasi tingkat kesadaran lingkungan di masyarakat, khususnya dalam konteks desa. Di wilayah pedesaan seperti Jatimulyo, nilai-nilai kolektif seperti gotong royong dan tanggung jawab sosial dapat memperkuat orientasi altruistik dan biosferik, sehingga memudahkan integrasi program lingkungan seperti pengelolaan sampah berbasis komunitas.

Dalam konteks pendidikan dan pembinaan masyarakat, kesadaran lingkungan dapat ditingkatkan melalui program edukasi berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengamatan, diskusi, dan aksi nyata di lingkungannya. Program-program berbasis partisipasi terbukti meningkatkan tingkat pemahaman dan kepedulian terhadap kebersihan dan keberlanjutan lingkungan desa. Pentingnya faktor internal seperti pengetahuan lingkungan dan nilai moral, serta faktor eksternal seperti dukungan sosial dan ketersediaan sarana lingkungan. Dengan demikian, kesadaran lingkungan bukanlah hasil dari satu faktor tunggal, melainkan akumulasi dari interaksi kompleks antara pengetahuan, nilai, pengalaman, dan lingkungan sosial tempat individu hidup.

Maka, disimpulkan bahwa kesadaran lingkungan menurut teori merupakan hasil integrasi antara pengetahuan, sikap, dan niat seseorang yang dibentuk melalui pengalaman, nilai-nilai yang diyakini, serta pengaruh sosial di sekitarnya. Dalam konteks program desa, meningkatnya kesadaran lingkungan menjadi modal penting dalam mendukung civic engagement masyarakat untuk terlibat aktif menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan secara kolektif.

## **2. Tinjauan Tentang Program Desa**

### **a. Pengertian Desa**

Desa merupakan satuan wilayah terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional. Secara umum, desa dipahami sebagai wilayah yang penduduknya memiliki kesatuan sosial, ekonomi, dan budaya, serta mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.

Dari perspektif antropologi, Clifford Geertz (1974) memandang masyarakat desa sebagai entitas agraris yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan memiliki struktur sosial, sistem nilai, serta kesadaran kolektif yang kuat. Desa juga dipahami sebagai kesatuan hukum dengan kewenangan untuk mengatur pemerintahan sendiri. Dalam konteks pembangunan, desa berfungsi sebagai pusat interaksi sosial, budaya, dan ekonomi yang menjadi basis penting dalam pembangunan berkelanjutan (Permana, 2020).

Menurut Bintarto (1983) desa adalah suatu perwujudan geografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat dalam suatu kesatuan wilayah, di mana terdapat sekelompok masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan bersama serta memiliki sistem nilai yang sama yang mengikat mereka dalam satu kesatuan kegiatan (Tanti & Handoyo, 2025). Sementara itu, Sementara itu, Sutardjo Kartohadikusumo (2015) menyatakan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum tempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa

mengadakan pemerintahan sendiri (Buulolo, Ndraha, & Telaumbanua, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 tentang Desa, desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia . Dengan demikian, desa bukan hanya entitas administratif, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan budaya yang khas. Pemahaman tentang desa dari berbagai sudut pandang ini penting sebagai landasan dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berbasis pada potensi lokal dan partisipasi masyarakat.

Desa memiliki berbagai fungsi strategis dalam sistem pemerintahan dan pembangunan nasional. Secara umum, desa menjalankan fungsi-fungsi sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang menyatu dalam kehidupan masyarakatnya. Menurut Soetomo (2011), fungsi desa dapat dibedakan menjadi empat bagian, yaitu (Sandika et al., 2024):

1. Fungsi Pemerintahan, desa berperan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang bersifat lokal berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas.
2. Fungsi Pembangunan, desa berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
3. Fungsi Kemasyarakatan, desa menjadi pusat interaksi sosial dan budaya serta wadah pembinaan nilai-nilai lokal seperti gotong royong.
4. Fungsi Pemberdayaan, desa menjadi penggerak partisipasi masyarakat dalam mengembangkan potensi dan sumber daya lokal.

Fungsi-fungsi tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa desa memiliki kewenangan

untuk mengatur urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (UU No. 6 Tahun 2014, Pasal 67). Desa memiliki karakteristik yang membedakannya dengan wilayah perkotaan. Menurut Slamet Soeseno (1985), desa memiliki ciri-ciri berikut (Sugiman, 2018):

1. Hubungan sosial yang bersifat kekeluargaan, dengan solidaritas sosial yang tinggi.
2. Kegiatan ekonomi bersifat agraris, bergantung pada sektor pertanian, peternakan, atau sumber daya alam lainnya.
3. Pengaruh budaya tradisional masih kuat, adat istiadat dan nilai lokal sangat mempengaruhi pola kehidupan.
4. Tingkat mobilitas penduduk rendah, karena sebagian besar penduduk menetap dalam satu wilayah dalam waktu lama.
5. Kelembagaan sosial sederhana, namun efektif dalam menyelesaikan masalah masyarakat.

Tujuan memahami fungsi dan karakteristik desa sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun kajian akademik, kita dapat melihat bahwa desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Keunikan struktur sosial, budaya, dan ekonomi desa menjadikannya sebagai basis yang potensial untuk penguatan partisipasi masyarakat, pelestarian nilai-nilai lokal, serta pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan desa harus disusun secara kontekstual dengan memperhatikan ciri khas dan potensi lokal, agar pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkeadilan.

#### **b. Pengertian program-program desa**

Program desa merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang, direncanakan, dan dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Program ini bersifat partisipatif dan berbasis pada potensi serta kebutuhan lokal desa (Sari

Arsyad & Ahmad, 2024). Menurut Kementerian Desa (2020), Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, program desa adalah bagian dari pelaksanaan pembangunan desa yang didanai melalui Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta sumber pembiayaan lainnya untuk mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas masyarakat, dan penguatan ekonomi desa. Program-program desa juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat yang diakui.

Secara yuridis, dasar hukum penyelenggaraan program desa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Pasal 26 ayat (4) huruf c UU Desa menyatakan bahwa kepala desa berkewajiban “mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat desa,” yang secara operasional dijalankan melalui program-program desa. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020, program pembangunan desa disusun berdasarkan hasil musyawarah desa dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Hal ini menunjukkan bahwa setiap program desa harus berbasis pada kebutuhan dan potensi desa yang diidentifikasi secara partisipatif.

Pengertian program desa sebagai rangkaian kegiatan terencana untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, dan kualitas hidup masyarakat desa, terdapat aspek lain yang juga penting dalam memahami program desa, yaitu pendekatan dan filosofi yang melandasi pelaksanaannya. Menurut Tjokrowinoto (2007) pembangunan desa seharusnya dilakukan berdasarkan tiga azas utama, yaitu azas pembangunan integral



(menyeluruh), azas kekuatan sendiri (swadaya), dan azas permufakatan bersama (partisipatif) .

Pendekatan pembangunan integral menekankan keseimbangan dalam membangun seluruh aspek kehidupan masyarakat desa, seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, dan perumahan, sehingga tidak ada satu sektor yang tertinggal atau berkembang secara tidak proporsional. Azas kekuatan sendiri menegaskan bahwa pembangunan desa harus bertumpu pada potensi dan kemampuan lokal, tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal (Tjokrowinoto, 2007). Sementara itu, azas permufakatan bersama menuntut adanya keterlibatan aktif seluruh masyarakat desa dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, sehingga program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

### c. **Kriteria Program Desa**

Program desa merupakan rangkaian kegiatan pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Agar program desa dapat berjalan efektif dan tepat sasaran, diperlukan kriteria yang jelas sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Berdasarkan regulasi dan literatur terbaru, kriteria program desa dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

#### 1. Fokus pada Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Salah satu kriteria utama adalah program desa harus memprioritaskan penanganan kemiskinan ekstrem. Pemerintah menetapkan bahwa penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga penerima manfaat yang terdampak kondisi ekonomi sulit (Kemendes PDTT, 2025). Kriteria ini bertujuan memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan membantu kelompok rentan di desa.

## 2. Mendukung Ketahanan Pangan dan Lingkungan

Program desa harus adaptif terhadap perubahan iklim dan berkontribusi pada ketahanan pangan. Dana Desa diarahkan untuk mendukung program swasembada pangan, pengelolaan air bersih, dan energi terbarukan yang berkelanjutan (Permendesa PDT No. 2 Tahun 2024). Hal ini sejalan dengan visi pembangunan desa yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

## 3. Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Potensi Lokal

Program desa harus mengutamakan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor ekonomi lokal. Minimal 20% Dana Desa dialokasikan sebagai penyertaan modal kepada BUMDes untuk mendorong kemandirian ekonomi desa (Permendesa PDT No. 2 Tahun 2024). Kriteria ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas ekonomi desa secara mandiri.

## 4. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengawasan

Pengelolaan program desa harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Hal ini penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan memastikan program sesuai kebutuhan masyarakat (Kemendes PDPT, 2025).

## 5. Kriteria Kinerja Desa

Kriteria kinerja menjadi dasar pemberian insentif desa, yang meliputi pengelolaan keuangan, pelaksanaan pembangunan, tata kelola yang akuntabel, serta penghargaan dari kementerian/lembaga terkait (PMK No. 108 Tahun 2024). Desa yang memenuhi kriteria ini mendapatkan insentif sebagai penghargaan atas kinerja baiknya.

## 6. Prioritas pada Peningkatan Kualitas SDM dan Layanan Dasar

Program desa juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan penanganan masalah stunting. Hal ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh (Kemendes PDPT, 2025).

Kriteria program desa menekankan pada keberpihakan kepada kelompok rentan, keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan ekonomi lokal, partisipasi masyarakat, serta tata kelola yang baik dan akuntabel. Dengan memenuhi kriteria ini, program desa dapat menjadi instrumen efektif dalam mendorong pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

### **3. Tinjauan Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

#### **a. Pengertian BUMDes dan Perannya**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha yang didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh masyarakat serta pemerintah desa guna memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat, yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal desa (Kementerian Desa, 2016). Menurut Maryunani (2008), BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperkuat ekonomi desa serta membangun solidaritas sosial, dengan modal usaha yang berasal dari desa (minimal 51%) dan masyarakat (selebihnya). Dasar hukum pembentukan BUMDes adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa BUMDes merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi desa yang berbasis pada potensi lokal.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan entitas penting dalam pembangunan ekonomi desa di Indonesia. BUMDes dibentuk berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola sumber daya dan asetnya. Tujuan utama pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes berperan sebagai motor penggerak perekonomian desa, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Keberhasilan BUMDes sangat bergantung pada manajemen yang efektif dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, BUMDes menjadi pilar penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang didirikan, dimiliki, dan dikelola secara bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan tujuan memperkuat perekonomian desa serta membangun kerekatan sosial di tingkat lokal (dispmd, 2017). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa, yang berfungsi mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Ridwlan, 2014). Dalam perkembangannya, para ahli seperti yang diungkapkan dalam kajian Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007) maupun berbagai penelitian ilmiah, menegaskan bahwa BUMDes harus dikelola dengan prinsip kooperatif, partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, serta berlandaskan pada potensi dan kebutuhan lokal desa agar mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, menurut Amri Marjali dkk. (2002), BUMDes juga harus mengedepankan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal, sehingga operasionalisasi usahanya benar-benar sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

BUMDes tidak hanya menciptakan lapangan kerja semata, tetapi juga membuka peluang bagi warga desa untuk mengembangkan keterampilan dan potensi diri. Melalui partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan usaha, warga desa memperoleh pengalaman kerja yang berharga, meningkatkan kemampuan manajemen, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan. BUMDes juga seringkali memberikan pelatihan dan pendampingan kepada warga, membekali mereka dengan keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha. Peluang kerja yang diciptakan BUMDes beragam, mulai dari posisi manajemen, produksi, pemasaran, hingga administrasi, sehingga dapat mengakomodasi berbagai latar belakang dan keahlian warga. Dengan demikian, BUMDes tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa.

BUMDes secara signifikan berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Keuntungan yang diperoleh dari berbagai usaha yang dikelola BUMDes menjadi sumber pendapatan tambahan bagi desa, mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan potensi desa lainnya. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMDes menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan PADes. Dengan pengelolaan yang baik, BUMDes mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan pembangunan desa secara berkelanjutan.

BUMDes menjadi wahana pemberdayaan masyarakat desa yang efektif. BUMDes mendorong partisipasi aktif warga dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan unit usaha, menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama. BUMDes memberikan kesempatan bagi warga untuk belajar berorganisasi, berwirausaha, dan mengelola keuangan secara profesional. Proses pengambilan keputusan yang demokratis dan transparan memastikan bahwa kepentingan masyarakat terakomodasi dengan baik. Dengan demikian, BUMDes tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa. BUMDes menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat desa dapat aktif berperan dalam pembangunan desanya sendiri (Yunita et al, 2019).

BUMDes berperan penting dalam penguatan kemandirian desa. Dengan mengelola sendiri potensi lokal dan sumber daya yang ada, desa menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada bantuan dari luar. BUMDes mendorong inovasi dan kreativitas warga desa dalam mengembangkan usaha yang sesuai dengan kondisi dan potensi lokal. BUMDes juga membangun kemitraan dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, untuk memperluas akses pasar

dan permodalan. Dengan demikian, BUMDes menjadi kunci dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. BUMDes menjadi bukti nyata bahwa desa mampu membangun dirinya sendiri dan mencapai kesejahteraan tanpa harus bergantung pada bantuan dari pihak luar (Putra A. S., 2015).

Pengelolaan BUMDes idealnya menekankan pada struktur manajemen yang jelas, kapasitas sumber daya manusia, dan sistem keuangan yang transparan serta akuntabel. Sebagai entitas yang menggabungkan fungsi sosial dan komersial, BUMDes memerlukan perencanaan yang sistematis, pengorganisasian pengurus dengan tugas terdefinisi, pelaksanaan program, serta pengawasan dan evaluasi secara berkala (Metra, 2023). Namun, banyak studi menunjukkan bahwa dalam praktiknya pengelolaan BUMDes masih menghadapi berbagai kendala. Misalnya, di Desa Mangki (Pinrang), keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan banyak unit usaha tidak beroperasi optimal dan inovasi usaha terhambat (Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Ekonomi desa di Desa Mangki Kecamatan Cempa Kabuupateen Pinrang, 2024). Di BUMDesa Sumber Sejahtera (Malang), perencanaan masih belum terstruktur, pencatatan serta pelaporan keuangan masih bersifat fleksibel dan perlu diperkuat (Iriani, Nugroho, & Tia, 2022); sementara di BUMDes Lolo Kecil, posisi yang kabur antara institusi sosial dan bisnis, serta pemahaman manajerial yang rendah, menjadi penghambat utama. Guna menanggulangi permasalahan tersebut, sejumlah studi merekomendasikan penguatan manajemen BUMDes melalui pelatihan dan pendampingan. Misalnya, di BUMDes Buluhnaman, pendekatan partisipatif seperti *Participatory Rural Appraisal* (PAR) berhasil meningkatkan tata kelola, perencanaan usaha, administrasi kelembagaan, dan kapasitas pengurus (Ginting, Ginting, & Afifah, 2024). Selain itu, penguatan manajemen keuangan secara khusus meliputi pencatatan akurat, pelaporan rutin, dan transparansi kepada masyarakat telah

berhasil meningkatkan kepercayaan publik dan akuntabilitas, seperti pada program pendampingan di Bondowoso (Bahanan, 2024).

Pengelolaan BUMDes yang efektif mensyaratkan lima elemen utama: (1) SDM yang kompeten; (2) sistem manajemen keuangan yang solid; (3) struktur organisasi yang jelas; (4) pelibatan masyarakat dalam pengawasan; dan (5) pendampingan serta pelatihan berkelanjutan bagi pengurus. Chasmatas hal tersebut menjadi fondasi bagi BUMDes untuk menjalankan peran ganda sebagai motor ekonomi inklusif dan lembaga yang memperkuat *civic engagement* masyarakat desa.

#### **b. Jenis-jenis program BUMDes Mulyo Jaya desa Jatimulyo**

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jatimulyo adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu diperlukan upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan efektif, efisien, profesional, dan mandiri. Untuk pencapaian tujuan BUMDes, dapat dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan.

BUMDes Jatimulyo merupakan salah satu wahana untuk menjalankan usaha di desa, usaha desa yang dijalankan meliputi usaha antara lain:

##### **a. Usaha penghimpunan sampah**

Usaha penghimpunan sampah melibatkan pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan limbah padat dari berbagai sumber. Ini bisa berupa usaha skala kecil, seperti pemulung independen yang mengumpulkan sampah rumah tangga untuk dijual kembali ke tempat daur ulang, atau usaha skala besar yang melibatkan kontrak dengan pemerintah daerah atau perusahaan swasta untuk pengelolaan sampah di wilayah tertentu. Model bisnisnya bervariasi, mulai dari pengumpulan dan penjualan langsung ke tempat pemrosesan, hingga pengolahan sampah menjadi produk baru yang memiliki nilai jual

lebih tinggi. Aspek penting dalam usaha ini termasuk pemilahan sampah, pengangkutan yang efisien, dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Keberhasilan usaha ini bergantung pada efisiensi operasional, pengelolaan yang baik, dan pemahaman pasar daur ulang

b. Usaha penyewaan mesin molen

Usaha penyewaan mesin molen merupakan bisnis yang menyediakan jasa penyewaan mesin pengaduk semen atau beton kepada individu atau perusahaan konstruksi. Keuntungan usaha ini terletak pada permintaan yang stabil dari sektor konstruksi dan relatif rendahnya biaya operasional jika mesin sudah dimiliki. Pertimbangan penting dalam menjalankan usaha ini meliputi jenis dan kapasitas mesin yang disewakan, harga sewa yang kompetitif, serta layanan purna jual yang baik. Faktor-faktor seperti lokasi usaha, target pasar, dan persaingan juga perlu dipertimbangkan. Keberhasilan usaha ini bergantung pada pemeliharaan mesin yang baik, manajemen yang efisien, dan pelayanan pelanggan yang memuaskan

c. Usaha penyewaan tabung gas

Usaha penyewaan tabung gas melibatkan penyediaan tabung gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) atau gas industri lainnya kepada pelanggan sesuai kebutuhan. Perlu diingat bahwa usaha ini mungkin memerlukan izin usaha dan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan yang ketat, terutama untuk gas-gas yang mudah terbakar atau beracun. Model bisnisnya bisa berupa penyewaan tabung gas kosong yang kemudian diisi oleh pelanggan sendiri, atau penyewaan tabung gas yang sudah terisi. Aspek penting dalam usaha ini adalah manajemen persediaan tabung gas, sistem pengisian yang aman dan efisien, serta layanan pelanggan yang responsif. Keberhasilan usaha ini bergantung pada pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap peraturan, dan pemeliharaan tabung gas yang baik

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat, diharapkan mampu memenuhi



standar pelayanan minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari luar maupun dari dalam desa). Demikian pula pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang dibangun dalam masyarakat desa.

Keberadaan BUMDes jika dikelola dengan tepat, akan menimbulkan permintaan pasar, lembaga ekonomi ini agar keberadaannya tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan, maka kepemilikannya oleh desa dan dikontrol bersama, dimana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat desa. Pendirian BUMDes dimaksudkan untuk mengurangi peran para tengkulak yang seringkali menyebabkan meningkatnya biaya transaksi antara harga produk dari produsen kepada konsumen. Melalui lembaga BUMDes, diharapkan dapat membantu kebutuhan pendanaan masyarakat, selain itu BUMDes berfungsi menumbuhkembangkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan. Pendirian BUMDes tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar (Faisal, 2019).

Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang, maka diperlukan sinergitas antar pemangku kepentingan di desa, yang mana membangun kerjasama dengan pihak ketiga dalam kerangka kerjasama sangat dibutuhkan. BUMDes dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaannya kuat dan ditopang dengan kebijakan yang memadai, pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Tujuan akhirnya adalah BUMDes sebagai instrumen modal sosial (*social capital*)

yang diharapkan mampu menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan (Utami, Tripalupi, & Meitriana, 2019).

Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan teknis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Disamping itu perlu memperhatikan potensi lokal serta dukungan kebijakan (*good will*) dari pemerintahan di atasnya, dalam rangka mengatasi rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa, yang disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan.

#### **c. Tujuan dan manfaat program penghimpunan sampah**

Program penghimpunan sampah memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui pengelolaan limbah yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan tersebut terwujud melalui berbagai strategi, mulai dari pengurangan sumber sampah di hulu, pemilahan sampah di sumbernya, hingga pengolahan dan pemanfaatan kembali sampah untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA). Keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, dukungan pemerintah, dan ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Salah satu manfaat penting dari program penghimpunan sampah adalah peningkatan kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah yang baik mencegah penyebaran penyakit yang ditularkan melalui vektor seperti lalat dan tikus, yang seringkali berkembang biak di tumpukan sampah. Selain itu, pengurangan pencemaran air dan tanah akibat pembuangan sampah sembarangan juga berkontribusi pada penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit yang terkait dengan lingkungan. Program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Penelitian

menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi cenderung lebih aktif dalam memilah dan mengelola sampah rumah tangganya (Asiah, et al., 2023).

Program penghimpunan sampah yang terjadwal dan efisien memberikan solusi praktis bagi masyarakat dalam pengelolaan limbah rumah tangga. Dengan adanya sistem pengumpulan sampah yang teratur, masyarakat tidak perlu lagi menumpuk sampah di rumah dalam waktu lama, mengurangi risiko bau tidak sedap, berkembangnya hama, dan potensi penyebaran penyakit (Saputra, 2025). Jadwal pengumpulan yang jelas dan mudah diakses memberikan kepastian dan kemudahan bagi warga untuk membuang sampah tepat waktu, tanpa harus khawatir akan keterlambatan atau penumpukan sampah. Lebih jauh lagi, program ini secara efektif mencegah pembuangan sampah sembarangan yang kerap mencemari lingkungan, merusak estetika, dan menimbulkan berbagai masalah kesehatan dan lingkungan lainnya. Dengan demikian, program penghimpunan sampah tidak hanya membantu dalam aspek praktis pengelolaan sampah, tetapi juga berkontribusi signifikan pada kebersihan dan kesehatan lingkungan (Holimah, Wahyuni, & Suhariyono, 2024).

#### **4. Tinjauan Tentang *Civic Engagement* Masyarakat di desa**

##### **a. Pengertian *Civic Engagement***

*Civic Engagement* merupakan konsep penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam upaya membangun masyarakat yang partisipatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Secara sederhana, *Civic Engagement* dapat diartikan sebagai keterlibatan aktif warga negara dalam berbagai aspek kehidupan publik, baik secara individu maupun kolektif, untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Robert D. Putnam (2000) mendefinisikan *civic engagement* sebagai Keterlibatan aktif warga negara dalam kehidupan sosial dan politik yang memperkuat modal sosial (*social capital*), jaringan sosial, dan kepercayaan antarwarga, yang berdampak positif pada demokrasi dan kesejahteraan Masyarakat. Menurut *American Psychological*

*Association, Civic engagement* adalah tindakan individu dan kolektif yang dirancang untuk mengidentifikasi serta mengatasi isu-isu kepentingan publik (Fitriyadi & Rahman, 2020, Setiawan, 2018). Keterlibatan ini dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti partisipasi dalam pembuatan kebijakan, pelayanan masyarakat, aksi sosial, atau kegiatan kemasyarakatan lainnya. *Civic Engagement* juga sering disebut sebagai *civic participation*, yang menekankan pentingnya setiap warga negara untuk turut serta dalam proses pembangunan dan perubahan sosial di lingkungannya (Setiawan, 2018). Dengan demikian, *Civic Engagement* menjadi penopang utama dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.

Menurut Teori Communitarianism yang dikembangkan oleh Amitai Etzioni (Yusup, Kistiono, & Ariska, 2019) dengan konsep *civic engagement* sangat erat dan saling melengkapi. Etzioni menekankan pentingnya komunitas sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat yang baik dan berkelanjutan. Dalam pandangan communitarianism, individu tidak berdiri sendiri melainkan terikat dalam jaringan sosial dan komunitas yang saling bergantung, di mana nilai-nilai bersama dan tanggung jawab sosial menjadi landasan utama. Communitarianism menyoroti bahwa keterlibatan warga dalam komunitas yang merupakan inti dari *civic engagement* adalah kunci untuk mempromosikan kebaikan bersama (*common good*). Etzioni berargumen bahwa masyarakat yang kuat dan stabil bergantung pada anggota yang memiliki kesadaran moral tentang apa yang “seharusnya” dilakukan, mematuhi nilai-nilai publik, dan aktif berpartisipasi dalam kehidupan komunitas untuk mencapai tujuan bersama (Schumaker, 2018). *Civic engagement* dalam kerangka communitarianism bukan hanya sekadar partisipasi formal seperti pemilu, tetapi juga keterlibatan dalam kegiatan sosial, pendidikan warga, dan pengambilan keputusan yang bersifat kolektif.

Tindakan-tindakan yang termasuk dalam *civic engagement* sangat beragam, mulai dari hal-hal yang bersifat struktural hingga aktivitas

sehari-hari yang dilakukan masyarakat. Bentuk *civic engagement* yang bersifat struktural misalnya keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan, perkumpulan bisnis, klub olahraga, atau partai politik, yang semuanya bertujuan untuk memperkuat jaringan sosial dan memperjuangkan kepentingan bersama (Fitrayadi & Rahman, 2020). Sedangkan aktivitas rutin seperti gotong royong, saling berkunjung, makan bersama, atau mengizinkan anak-anak bermain bersama juga merupakan bagian dari *civic engagement* yang bersifat keseharian (Fitrayadi & Rahman, 2020). Tindakan-tindakan ini menunjukkan bahwa *civic engagement* tidak selalu harus bersifat formal, melainkan dapat dilakukan melalui interaksi sosial yang sederhana namun bermakna. Dengan demikian, *civic engagement* mencakup seluruh spektrum aktivitas yang memperkuat kohesi sosial dan solidaritas masyarakat. Bahkan, keterlibatan dalam festival desa atau kegiatan sosial lain juga menjadi contoh nyata dari *civic engagement* dalam kehidupan bermasyarakat.

*Civic engagement* memiliki peran sentral dalam membangun kesadaran warga negara (*civic awareness*) serta mengembangkan nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Menurut Syaifullah (2015), *civic engagement* merupakan konsep utama dalam *community civic* yang menekankan keterlibatan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan (Fitrayadi & Rahman, 2020). Keterlibatan ini tidak hanya bermanfaat bagi individu yang melakukannya, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas, seperti meningkatnya kepercayaan antarwarga, terciptanya lingkungan yang aman, dan terwujudnya perubahan sosial yang berkelanjutan. *Civic engagement* juga mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, *Civic Engagement* menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, *civic engagement* juga menjadi sarana pendidikan karakter dan pembentukan identitas bangsa.

Dalam konteks masyarakat desa, *civic engagement* memiliki makna yang sangat penting karena masyarakat desa umumnya hidup dalam lingkungan yang erat, saling mengenal, dan memiliki tradisi gotong royong yang kuat. Keterlibatan warga desa dalam pembangunan desa, misalnya melalui musyawarah desa, kerja bakti, atau pelaksanaan program-program desa, merupakan wujud nyata dari *civic engagement* (Fitrayadi & Rahman, 2020). *Civic engagement* di desa tidak hanya memperkuat solidaritas sosial, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Selain itu, *civic engagement* juga mendorong munculnya inisiatif-inisiatif lokal yang berbasis kebutuhan masyarakat, seperti pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan atau pengembangan usaha ekonomi desa. Dengan demikian, *civic engagement* menjadi motor penggerak dalam memperkuat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Bahkan, *civic engagement* juga dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi masyarakat desa, seperti keterbatasan akses informasi, rendahnya partisipasi, atau konflik kepentingan.

Secara umum, *civic engagement* merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang demokratis, inklusif, dan berkelanjutan. Keterlibatan aktif warga negara dalam kehidupan publik tidak hanya memperkuat kohesi sosial, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah. *Civic engagement* juga mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya inovasi, kreativitas, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam jangka panjang, *civic engagement* akan membentuk masyarakat yang lebih sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta mampu berperan aktif dalam proses perubahan sosial. Dengan demikian, *civic engagement* menjadi kunci dalam mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil, makmur, dan beradab (Sihombing, Hodriani, & Alhudawi, 2023). Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat *Civic Engagement*

harus terus digalakkan melalui pendidikan, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan di tingkat masyarakat.

**b. Dimensi-dimensi *Civic Engagement***

Putnam (2000) mengemukakan bahwa *civic engagement* merupakan inti dari modal sosial (*social capital*) yang meliputi jaringan sosial, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama untuk kepentingan bersama. Dalam konteks ini, *civic engagement* melibatkan partisipasi aktif warga dalam berbagai aktivitas sosial dan politik yang memperkuat kohesi sosial dan kapasitas komunitas (Mandanaro, 2015). Putnam mengidentifikasi beberapa dimensi utama *civic engagement*, yaitu:

1. Partisipasi Politik

Meliputi kegiatan seperti pemungutan suara, keikutsertaan dalam organisasi politik, dan aktivitas politik akar rumput. Partisipasi ini menunjukkan keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan politik.

2. Partisipasi Sosial

Meliputi keanggotaan dan aktivitas dalam organisasi sosial, keagamaan, dan komunitas lokal yang membangun jaringan sosial dan solidaritas antarwarga.

3. Kepercayaan Sosial

Tingkat kepercayaan antar individu dalam komunitas yang menjadi dasar terjadinya kerja sama dan norma timbal balik (*reciprocity*).

4. Norma Timbal Balik (*Reciprocity*)

Keyakinan bahwa bantuan atau kebaikan yang diberikan akan dibalas di masa depan, yang memperkuat hubungan sosial dan kerja sama.

Putnam juga menekankan bahwa jaringan keterlibatan warga yang kuat akan mendorong munculnya norma-norma sosial yang positif dan meningkatkan kepercayaan, sehingga mempermudah koordinasi dan kolaborasi dalam komunitas (Putnam, 2000). Studi Putnam di Italia dan

Amerika Serikat menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat *civic engagement* yang tinggi memiliki pemerintahan yang lebih efektif dan masyarakat yang lebih sejahtera.

Namun, ada banyak definisi lain mengenai *civic engagement* atau keterlibatan warga memiliki beberapa dimensi utama yang saling melengkapi dan membentuk karakter partisipasi masyarakat dalam kehidupan publik. Berdasarkan berbagai kajian, dimensi-dimensi *civic engagement* dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. *Civic Knowledge* (Pengetahuan Kewarganegaraan) Merupakan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pengetahuan tentang sistem pemerintahan, hukum, dan isu-isu sosial yang relevan. Pengetahuan ini menjadi dasar bagi warga untuk terlibat secara cerdas dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Sihombing, Hodriani, & Alhudawi, 2023). *Civic knowledge* juga mencakup pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan identitas nasional (Arif, 2016).
2. *Civic Skills* (Keterampilan Kewarganegaraan) Terdiri dari keterampilan intelektual (*cognitive skills*) seperti berpikir kritis, analitis, dan pemecahan masalah, serta keterampilan partisipasi (*participatory skills*) seperti kemampuan berorganisasi, berkomunikasi, dan bekerja sama (Arif, 2016). Keterampilan ini memungkinkan warga untuk aktif dalam berbagai aktivitas sosial, politik, dan ekonomi di lingkungannya. *Civic skills* juga meliputi kemampuan mengelola konflik dan mengambil keputusan secara kolektif.
3. *Civic Disposition* (Sikap dan Karakter Kewarganegaraan) Merupakan sikap, nilai, dan kebiasaan yang mendukung terciptanya kehidupan sosial yang sehat dan berkeadilan (Arif, 2016). Sikap ini mencakup rasa tanggung jawab, kejujuran, toleransi, kepedulian sosial, dan komitmen terhadap kepentingan umum. *Civic disposition* menjadi



landasan moral bagi warga dalam berpartisipasi dan berkontribusi bagi masyarakat.

4. *Civic Participation* (Partisipasi Kewarganegaraan) Merupakan tindakan nyata warga dalam kehidupan publik, baik secara individu maupun kolektif (Sunarto & Sutrisno, 2021). Bentuk partisipasi dapat berupa keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan, kegiatan gotong royong, aksi sosial, pemilihan umum, atau pengambilan keputusan di tingkat komunitas. *Civic participation* juga mencakup keterlibatan dalam kegiatan yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan, lingkungan, infrastruktur, dan energi.
5. *Civic Confidence* (Kepercayaan Diri Kewarganegaraan) Merupakan keyakinan warga bahwa dirinya mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan percaya diri dalam mengambil keputusan publik. Kepercayaan diri ini dibangun melalui pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki. *Civic confidence* memungkinkan warga untuk berani menyampaikan pendapat, mengajukan inisiatif, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Dimensi-dimensi tersebut saling berkaitan dan membentuk kerangka *civic engagement* yang utuh, sehingga warga mampu berperan aktif, bertanggung jawab, dan berkontribusi nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

**c. Faktor-faktor yang mempengaruhi *Civic Engagement* di Masyarakat**

Faktor-faktor yang mempengaruhi *civic engagement* menurut Robert Putnam meliputi beberapa aspek utama yang berkaitan dengan perubahan sosial dan kondisi masyarakat. Putnam (2001) menyoroti bahwa faktor-faktor seperti perubahan teknologi, perubahan ekonomi, urbanisasi, dan pengaruh media menjadi penyebab menurunnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial tradisional. Perkembangan teknologi dan media, misalnya, menggeser cara orang berinteraksi dan berpartisipasi dalam komunitas, yang dapat mengurangi keterlibatan langsung dalam kegiatan sosial (Tarsidi, 2023). Maka, *civic engagement* di masyarakat dipengaruhi

oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari dalam individu maupun lingkungan eksternal. Berikut penjelasan faktor-faktor utama yang mempengaruhi *civic engagement*:

1. Dukungan Lingkungan Sosial

Dukungan dari lingkungan sosial, seperti keluarga, teman, dan komunitas, sangat penting dalam mendorong partisipasi warga dalam kegiatan *civic engagement*. Penelitian pada generasi Z di Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa didukung oleh lingkungannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Dukungan ini dapat berupa dorongan moral, bantuan sumber daya, atau kesempatan untuk terlibat dalam berbagai aktivitas bersama. Kurangnya dukungan dari lingkungan dapat menjadi hambatan serius bagi individu untuk terlibat aktif (Azizah & Sari, 2023).

2. Motivasi dan Minat Individu

Motivasi intrinsik, seperti rasa empati, tanggung jawab sosial, dan keinginan untuk membantu sesama, menjadi pendorong utama keterlibatan warga dalam *civic engagement*. Individu yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih aktif dan konsisten dalam berpartisipasi. Selain itu, motivasi ekstrinsik seperti keinginan untuk menambah pengalaman, relasi, atau memperoleh pengakuan sosial juga turut mempengaruhi tingkat keterlibatan (Azizah & Sari, 2023).

3. Pengetahuan dan Keterampilan Kewarganegaraan

Tingkat pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara (*civic knowledge*) serta keterampilan berorganisasi, berkomunikasi, dan bekerja sama (*civic skills*) sangat penting dalam membentuk *civic engagement*. Individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai akan lebih percaya diri dan mampu berpartisipasi secara efektif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan (Mentari et al, 2024, Prasetyo et al, 2024)

4. Kecerdasan Interpersonal

Kemampuan seseorang dalam berelasi, berkomunikasi, membangun dan menjaga hubungan sosial (kecerdasan interpersonal) juga berperan penting dalam *civic engagement*. Individu yang memiliki kecerdasan interpersonal tinggi cenderung lebih mudah terlibat dalam kegiatan sosial dan mampu bekerja sama dengan orang lain (Mentari et al, 2024)

#### 5. Kesempatan dan Akses

Ketersediaan kesempatan dan akses untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat sangat menentukan tingkat *civic engagement*. Jika individu memiliki kemauan dan kemampuan, tetapi tidak memiliki kesempatan atau akses terhadap kegiatan, maka keterlibatannya tetap terbatas.

#### 6. Faktor Eksternal Lainnya

Faktor-faktor eksternal seperti kendala finansial, waktu, serta terbatasnya sarana dan prasarana juga dapat menghambat *civic engagement*. Misalnya, keterbatasan dana atau kesulitan mengatur waktu dapat mengurangi intensitas partisipasi individu dalam kegiatan sosial. Selain itu, norma sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat juga dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan warga.

Secara keseluruhan, *civic engagement* di masyarakat merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor internal (motivasi, pengetahuan, keterampilan, kecerdasan interpersonal) dan faktor eksternal (dukungan lingkungan, kesempatan, akses, serta kendala finansial dan teknis).

### B. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini didukung oleh berbagai studi terdahulu yang relevan dan menjadi pijakan teoritis maupun empiris. Kajian-kajian tersebut memperkaya pemahaman terhadap konteks *civic engagement* dan peran program pengelolaan sampah oleh BUMDes. Beberapa penelitian yang relevan antara lain:

1. Penelitian oleh Anik Sugiharti (2020) dengan judul “Peran Bank Sampah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Purworejo” bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bank sampah dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa bank sampah berhasil meningkatkan partisipasi warga dalam memilah dan mendaur ulang sampah, sekaligus meningkatkan kesadaran lingkungan. Penelitian ini lebih berfokus pada wilayah perkotaan dan peran bank sampah, sedangkan penelitian Anda lebih menyoroti program BUMDes di wilayah pedesaan.
2. Penelitian oleh Sabar Riyanto dan rekan-rekannya (2023) meneliti “Mekanisme Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Sami Asih Desa Jatiwangsan”. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis strategi pengelolaan sampah untuk meningkatkan efisiensi layanan dan partisipasi warga. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa struktur pengelolaan sampah berbasis komunitas dan kepercayaan masyarakat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah serta mempererat solidaritas sosial. Fokus penelitian ini lebih pada aspek teknis dan manajerial bank sampah, sedangkan penelitian ini mengulas pengaruh program BUMDes terhadap *civic engagement* secara menyeluruh.
3. Penelitian oleh Nabila dan Yuniningsih (2023) yang berjudul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan: Studi Perbandingan di Lingkungan Pedesaan” bertujuan mengeksplorasi hubungan antara keterlibatan masyarakat dalam kegiatan lingkungan dan dampaknya terhadap kualitas hidup serta solidaritas sosial. Studi ini menggunakan pendekatan literatur dan menyimpulkan bahwa keberhasilan program lingkungan sangat tergantung pada keterlibatan warga dalam edukasi, sosialisasi, dan pengawasan. Meskipun relevan, metode penelitian ini berbeda karena berbasis studi pustaka, sementara penelitian Anda menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data lapangan.
4. Penelitian oleh Rafi Alfiansyah (2021) meneliti “Peran BUMDes dalam Pengelolaan Sampah dengan Insinerator dan Komposter di Desa

Sumbergondo, Kota Batu”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa BUMDes memainkan peran penting dalam pengelolaan sampah melalui teknologi seperti insinerator dan komposter, yang turut meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah. Penelitian ini relevan karena menunjukkan efektivitas BUMDes dalam membangun kepedulian dan partisipasi warga.

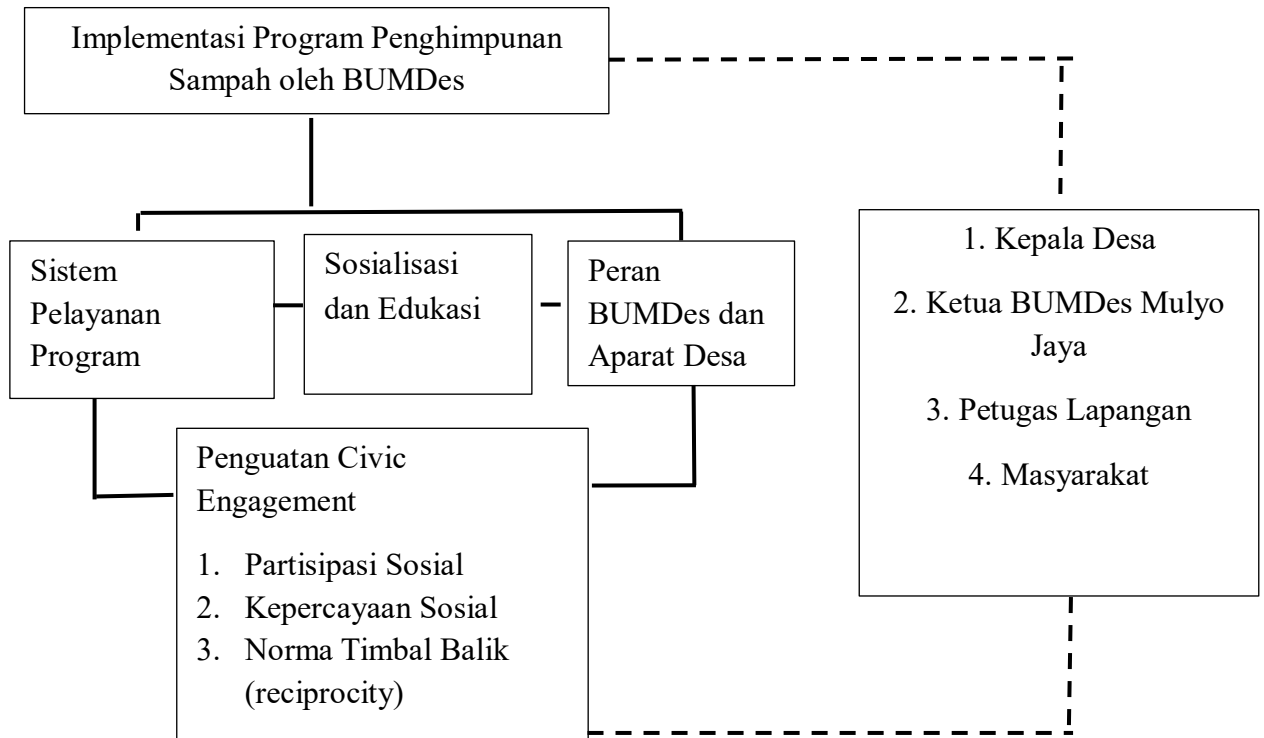
5. Studi oleh Lukman Assaid dan rekan-rekan (2022) bertajuk “Membangun Sinergi Masyarakat pada Program Bank Sampah oleh BUMDes di Dusun Karang Sari” berfokus pada pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam program yang dijalankan oleh BUMDes. Melalui pendekatan kualitatif berupa diskusi, sosialisasi, dan observasi, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi dalam program bank sampah, terutama dalam aktivitas memilah dan mendaur ulang sampah. Temuan ini menunjukkan pentingnya sosialisasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam keberhasilan program pengelolaan sampah oleh BUMDes.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah, baik melalui bank sampah maupun program yang dikelola oleh BUMDes, sangat bergantung pada tingkat partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat. Seluruh studi menegaskan pentingnya kesadaran lingkungan, dukungan komunitas, serta peran strategis lembaga lokal dalam membangun solidaritas sosial dan efektivitas pengelolaan sampah. Penelitian-penelitian tersebut, meskipun menggunakan pendekatan kualitatif dan beragam konteks wilayah (baik perkotaan maupun pedesaan), memberikan gambaran bahwa keterlibatan warga dalam pengelolaan sampah tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memperkuat *civic engagement* melalui peningkatan kepedulian, kolaborasi sosial, dan rasa memiliki terhadap program desa. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi yang relevan sekaligus melengkapi kajian sebelumnya dengan pendekatan kuantitatif dan fokus pada pengaruh program penghimpunan sampah oleh BUMDes terhadap keterlibatan warga di wilayah pedesaan.

### **C. Kerangka Pikir**

Permasalahan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, merupakan isu yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga sosial. Dalam kehidupan masyarakat desa, keberhasilan suatu program sering kali tidak semata-mata ditentukan oleh kelengkapan sarana dan prasarana, melainkan oleh keterlibatan aktif warga serta sinergi antara lembaga desa dan masyarakat. Oleh karena itu, memahami implementasi program desa memerlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap proses, aktor yang terlibat, serta pola hubungan yang terbentuk dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, program penghimpunan sampah oleh BUMDes menjadi contoh konkret dari upaya kolektif desa dalam membangun kebiasaan baru yang lebih peduli terhadap lingkungan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis dan terstruktur, peneliti menyusun kerangka pikir yang memvisualisasikan hubungan antar unsur dalam pelaksanaan program. Kerangka ini menunjukkan bagaimana proses layanan, peran kelembagaan, dan upaya edukasi berinteraksi dan berkontribusi terhadap terbentuknya keterlibatan sosial masyarakat dalam program yang dijalankan. Gambar berikut ini memperlihatkan alur pemikiran yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.



**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**

### III. METODELOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Menurut Sugiyono (2017), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (bukan eksperimen), dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama dari penelitian ini bukan untuk menguji hipotesis atau menghasilkan generalisasi secara statistik, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan holistik mengenai implementasi program penghimpunan sampah oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam membentuk dan memperkuat *civic engagement* masyarakat Desa Jatimulyo. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan "bagaimana" suatu proses sosial terjadi, serta memahami dinamika hubungan antara aktor, lembaga, dan praktik sosial dalam konteks lokal yang spesifik. Dalam hal ini, pendekatan kualitatif dianggap paling relevan karena memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami fenomena secara kontekstual, subjektif, dan mendalam (Creswell, 2015).

Menurut Creswell (2015), pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial oleh sejumlah individu atau kelompok. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama yang secara langsung berinteraksi dengan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, serta melakukan interpretasi terhadap makna-makna yang muncul dari perspektif partisipan. Oleh karena itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap realitas sosial dalam bentuk narasi yang kompleks, yang sering kali terabaikan dalam pendekatan kuantitatif yang mengandalkan angka dan statistik.



Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, karena fokusnya diarahkan pada satu unit analisis secara mendalam, yaitu pelaksanaan Program Penghimpunan Sampah oleh BUMDes Mulyo Jaya di Desa Jatimulyo. Studi kasus memberikan peluang kepada peneliti untuk melakukan eksplorasi secara mendetail terhadap suatu fenomena, individu, kelompok, lembaga, atau proses sosial tertentu dalam batasan ruang dan waktu yang jelas. Robert K. Yin (2018) mendefinisikan studi kasus sebagai suatu inkuiri empiris untuk menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, di mana batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat jelas. Studi kasus menggunakan multi sumber bukti dan mengeksplorasi fenomena secara mendetail dengan sedikit kendali peneliti atas fenomena tersebut.

Dalam konteks ini, studi kasus bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci dan memahami secara mendalam praktik pelaksanaan program oleh BUMDes, bagaimana masyarakat meresponsnya, sejauh mana partisipasi masyarakat muncul, dan bagaimana interaksi antara aparat desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat berjalan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengambil kesimpulan yang berlaku umum, tetapi untuk memberikan pemahaman kontekstual yang kaya atas satu kasus yang unik dan khas. Hal ini sejalan dengan pandangan Merriam dan Tisdell (2016) yang menyebutkan bahwa studi kasus kualitatif berfokus pada penggalian makna, pemahaman, dan proses dalam konteks alami, dengan menjadikan partisipan sebagai sumber utama pengetahuan.

Dalam pelaksanaannya, pendekatan kualitatif dan metode studi kasus menuntut keterlibatan aktif peneliti dalam pengumpulan data di lapangan. Peneliti hadir secara langsung di lokasi penelitian, mengamati perilaku dan interaksi masyarakat, mewawancarai berbagai informan kunci seperti kepala desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat, serta menganalisis dokumen-dokumen pendukung seperti laporan program dan data kepesertaan. Peneliti tidak hanya berperan sebagai pengumpul data, tetapi juga sebagai interpretator yang harus memahami dan menafsirkan makna di balik tindakan, ucapan, dan simbol yang muncul dalam konteks sosial masyarakat desa. Seperti dinyatakan oleh Ravitch dan Carl (2016), peneliti kualitatif harus mampu menunjukkan keterampilan

reflektif, interpretatif, dan analitis yang kuat untuk mengolah data yang kompleks dan kaya makna.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan program desa secara utuh, dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga penerimaan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap nuansa sosial yang mungkin tersembunyi di balik data statistik, seperti motivasi masyarakat untuk berpartisipasi, hambatan yang dihadapi, makna yang mereka lekatkan terhadap program, serta bagaimana kepercayaan, norma, dan solidaritas sosial terbentuk dalam kerangka *civic engagement*. Melalui metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan pemahaman teoritis dan praktis mengenai hubungan antara program pembangunan desa dan penguatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara *purposive* (bertujuan), dengan pertimbangan bahwa Desa Jatimulyo merupakan salah satu desa yang telah mengembangkan program penghimpunan sampah berbasis desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mulyo Jaya. Program ini menjadi menarik untuk diteliti karena dilaksanakan secara sistematis dan melibatkan masyarakat secara langsung sebagai bagian dari pelayanan sosial sekaligus upaya membangun kesadaran kolektif terhadap kebersihan lingkungan.

Secara administratif, Desa Jatimulyo termasuk dalam wilayah yang berkembang dan berada cukup dekat dengan pusat kota, namun tetap mempertahankan karakteristik sosial dan budaya khas pedesaan. Desa ini memiliki struktur kelembagaan desa yang aktif, termasuk dalam pengelolaan BUMDes yang menjadi motor ekonomi dan sosial masyarakat. Selain itu, berdasarkan observasi awal dan data dari Pemerintah Desa, diketahui bahwa program ini telah berjalan lebih dari lima tahun dan mendapatkan respons yang cukup positif dari sebagian

masyarakat. Namun demikian, partisipasi mas masih menunjukkan dinamika yang beragam sehingga menjadi penting untuk ditelaah lebih lanjut bagaimana proses implementasi program ini berlangsung dan bagaimana ia berkontribusi terhadap pembentukan *civic engagement* di tingkat desa. Oleh karena itu, Desa Jatimulyo dipandang sebagai lokasi yang tepat dan relevan untuk mengkaji secara mendalam praktik program desa yang berkelanjutan, berbasis masyarakat, dan bernuansa partisipatif.

### C. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah implementasi Program Penghimpunan Sampah oleh BUMDes Mulyo Jaya di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Program ini menjadi fokus karena merupakan salah satu inisiatif desa dalam mengelola sampah secara kolektif melalui pendekatan pelayanan berbasis komunitas. Objek ini mencakup bagaimana program dirancang, dijalankan, dan diterima oleh masyarakat, serta bagaimana interaksi antara pengelola BUMDes, aparat desa, dan masyarakat desa membentuk pola partisipasi sosial dalam pelaksanaannya.

### D. Informan dan Unit Analisis

#### 1. Informan

Dalam penelitian ini, informan dipilih secara *purposive*, yaitu dengan mempertimbangkan siapa saja yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam implementasi Program Penghimpunan Sampah oleh BUMDes Mulyo Jaya di Desa Jatimulyo. Informan terdiri dari berbagai pihak yang merepresentasikan perspektif kelembagaan maupun masyarakat. Mereka meliputi kepala desa, pengurus BUMDes, petugas lapangan pengangkut sampah, serta masyarakat desa yang berperan dalam program tersebut, akan tetapi pada bagian penyajian data dan pembahasan digunakan istilah warga untuk menunjukkan individu-individu yang menjadi informan penelitian. Istilah warga dipahami sebagai bagian dari masyarakat yang merepresentasikan pengalaman, persepsi, dan praktik sosial yang ada di Desa Jatimulyo. Dengan demikian, penggunaan istilah masyarakat dan warga tetap

konsisten secara konseptual dan tidak menimbulkan perbedaan makna dalam penelitian ini.

Pemilihan informan didasarkan pada prinsip kecukupan informasi (*information-rich cases*), yaitu mereka yang dianggap mampu memberikan data yang relevan, mendalam, dan kontekstual terkait pelaksanaan program dan keterlibatan masyarakat. Jumlah informan tidak ditentukan secara pasti sejak awal, tetapi ditetapkan secara fleksibel hingga mencapai titik jenuh data (*data saturation*), di mana tidak ditemukan informasi baru yang signifikan.’

## **2. Unit Analisis**

Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah praktik sosial dari pelaksanaan Program Penghimpunan Sampah oleh BUMDes Mulyo Jaya di tingkat desa. Unit analisis mencakup dinamika hubungan antar aktor, proses pelayanan program, pola komunikasi, partisipasi masyarakat, serta dampak sosial yang ditimbulkan dalam konteks penguatan *civic engagement* masyarakat Desa Jatimulyo.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2017), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang tepat akan sangat menentukan kualitas data yang diperoleh dan pada akhirnya mempengaruhi kualitas hasil penelitian secara keseluruhan. Senada dengan itu, Arikunto (2010) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data secara sistematis dan objektif. Sementara itu, Moleong (2017) menekankan bahwa dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data biasanya dilakukan secara naturalistik dan bersifat fleksibel agar peneliti dapat menggali makna yang lebih mendalam dari partisipan. Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, pemilihan teknik pengumpulan data harus disesuaikan dengan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan agar data yang diperoleh relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Fadli, 2021).

Dalam hal pengumpulan data, peneliti terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2017) menyatakan bahwa ada tiga macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur (*Structured Interview*), wawancara semi terstruktur (*Semistructure Interview*). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini sudah masuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide idenya.

Wawancara dilakukan kepada informan kunci yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program, sebagai berikut :

- a) kepala desa Sebagai pimpinan pemerintahan desa, kepala desa memiliki peran strategis dalam menginisiasi, mengarahkan, serta mendukung kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Kepala desa juga bertanggung jawab dalam mengoordinasikan lembaga desa seperti BUMDes dan memastikan program berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam wawancara, kepala desa menjadi sumber informasi utama terkait latar belakang kebijakan program, dukungan anggaran atau regulasi desa, serta evaluasi umum atas keberjalanan program.
- b) Pengurus BUMDes Mulyo Jaya, khususnya yang terlibat langsung dalam pengelolaan program penghimpunan sampah, menjadi aktor pelaksana teknis yang sangat penting. Mereka memiliki pengetahuan tentang perencanaan program, mekanisme operasional, strategi pelibatan masyarakat, kendala lapangan, serta capaian yang telah diperoleh. Wawancara dengan pengurus BUMDes bertujuan untuk memahami aspek manajerial, teknis, serta komunikasi antara lembaga desa dan masyarakat.

- c) Petugas lapangan adalah pelaksana teknis harian yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Mereka memiliki informasi konkret terkait partisipasi masyarakat, pola keterlibatan, kedisiplinan dalam memilah dan menyerahkan sampah, serta hambatan teknis yang sering ditemui selama proses penghimpunan. Wawancara dengan petugas ini memberikan sudut pandang praktis mengenai implementasi program di tingkat operasional, serta respons sosial yang mereka temui secara langsung.
- d) Masyarakat yang terlibat dalam program penghimpunan sampah. Informan dari kalangan masyarakat dipilih untuk menggambarkan perspektif penerima manfaat program. Masyarakat yang aktif berpartisipasi dapat menjelaskan motivasi mereka, pengalaman mengikuti program, serta dampak yang dirasakan secara pribadi maupun sosial untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang tingkat *civic engagement* masyarakat dalam konteks program desa. Dalam konteks ini, istilah masyarakat digunakan untuk merujuk pada kelompok sosial Desa Jatimulyo secara keseluruhan, sedangkan istilah warga digunakan untuk menyebut individu yang menjadi informan wawancara. Para warga tersebut dipilih karena dianggap mampu mewakili pengalaman dan pandangan masyarakat secara umum terkait program penghimpunan sampah.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan terbuka agar informan dapat menjelaskan pandangannya secara luas dan bebas. Menurut Creswell (2016), wawancara dalam penelitian kualitatif membantu peneliti mengeksplorasi makna yang diberikan oleh partisipan terhadap pengalaman hidup mereka dalam konteks sosial tertentu (Timario & Lomibao, 2023).

## 2. Observasi

Peneliti melakukan observasi langsung terhadap aktivitas terkait program di lapangan, baik dalam bentuk pengumpulan sampah, pertemuan masyarakat, maupun interaksi antara pelaksana program dan masyarakat. Observasi

dilakukan secara partisipatif untuk menangkap kejadian dan perilaku sosial secara alami di tempat berlangsungnya aktivitas. Seperti dijelaskan oleh Saldaña (2015), observasi dalam penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menangkap nuansa sosial yang tidak selalu terungkap dalam wawancara, terutama dalam konteks interaksi sosial dan dinamika nonverbal (Saldaña & Omasta, 2017).

### **3. Dokumentasi**

Menurut Sugiyono (2017) dokumentasi merupakan bentuk cara untuk mendapatkan data informasi dalam bentuk buku, dokumen, arsip, tulisan, dan angka, dan gambar yang berupa laporan yang dapat menunjang penelitian yang dilakukan. Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data tertulis dan visual yang relevan dengan topik penelitian, seperti laporan pelaksanaan program, data keanggotaan, peraturan desa, dan dokumentasi kegiatan. Dokumentasi berfungsi untuk melengkapi dan memverifikasi data dari wawancara dan observasi. Merriam dan Tisdell (2016) menyatakan bahwa dokumen dalam penelitian kualitatif berperan sebagai sumber data sekunder yang dapat memperkuat atau menambah perspektif terhadap data lapangan.

Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, yakni dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi berguna untuk meningkatkan kepercayaan terhadap temuan dan mengurangi bias interpretasi. Creswell (2016) menyebut triangulasi sebagai bagian penting dari validasi dalam penelitian kualitatif untuk mengkonfirmasi konsistensi informasi dari berbagai sudut.

### **F. Uji Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif, validitas data menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang mengandalkan instrumen statistik, keabsahan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada kualitas proses, kejujuran data, dan kedalaman

interpretasi yang dibangun. Oleh karena itu, peneliti menggunakan beberapa strategi uji keabsahan data yang lazim diterapkan dalam pendekatan kualitatif, yaitu triangulasi, *member check*, ketekunan pengamatan, dan audit trail (Creswell & Poth, 2018). Masing-masing teknik dijelaskan secara terperinci berikut ini.

### 1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik validasi data dengan cara membandingkan dan menggabungkan informasi dari berbagai sumber, metode, atau waktu yang berbeda untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan utuh. Dalam konteks penelitian ini, triangulasi dilakukan untuk memverifikasi konsistensi data yang dikumpulkan dari kepala desa, pengurus BUMDes, petugas pengangkut sampah, dan masyarakat, serta melalui berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Menurut Creswell (2016), triangulasi sangat penting untuk menghindari bias subjektif dari peneliti dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Dengan menguji konsistensi temuan dari berbagai sudut, peneliti dapat membangun interpretasi yang lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dalam tiga bentuk:

- a) Triangulasi Sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai kategori informan, seperti pengambil kebijakan (kepala desa), pelaksana program (BUMDes dan petugas), serta masyarakat pengguna program.
- b) Triangulasi Teknik, yaitu mengombinasikan wawancara, observasi langsung di lapangan, dan analisis dokumen administratif seperti laporan program, notulen rapat, dan dokumentasi kegiatan.
- c) Triangulasi Waktu, yaitu pengumpulan data dilakukan pada beberapa fase berbeda (awal, pertengahan, dan setelah program berjalan), untuk mengetahui apakah informasi yang disampaikan konsisten atau berubah.

### 2. *Member Check*

Menurut Merriam dan Tisdell (2016), *member checking* merupakan teknik validasi yang paling mendasar dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan informan untuk mengonfirmasi kembali representasi mereka



dalam data yang dianalisis. Creswell dan Poth (2018) juga menegaskan bahwa *member check* adalah prosedur utama untuk membangun *credibility* atau kredibilitas temuan, karena melibatkan verifikasi langsung dari pihak yang menjadi subjek penelitian. *Member check* atau validasi oleh partisipan merupakan salah satu teknik paling penting dalam memastikan keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan cara mengembalikan hasil temuan atau interpretasi data kepada informan untuk dikonfirmasi ulang. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah makna yang ditangkap dan dianalisis oleh peneliti benar-benar sesuai dengan pengalaman, pemahaman, dan maksud dari informan.

Dalam penelitian ini, *member check* dilakukan secara berkelanjutan, terutama setelah proses transkripsi wawancara dan interpretasi awal data. Setelah wawancara mendalam dengan kepala desa, pengurus BUMDes, petugas lapangan, dan masyarakat selesai dilakukan, peneliti menyusun ringkasan hasil wawancara dan analisis tematik awal. Ringkasan ini kemudian dikonsultasikan kembali kepada masing-masing informan, baik secara langsung maupun melalui komunikasi daring jika memungkinkan.

### **3. Ketekunan Pengamatan (*Persistent Observation*)**

Ketekunan pengamatan atau *persistent observation* merupakan salah satu strategi utama dalam menjamin keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Teknik ini mengharuskan peneliti untuk melakukan pengamatan secara intensif, mendalam, dan terus-menerus terhadap fenomena sosial yang diteliti, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang utuh, mendalam, dan kontekstual mengenai objek yang dikaji.

Menurut Creswell (2016), pengamatan yang terus menerus memungkinkan peneliti membedakan antara informasi yang penting dan tidak penting, serta mengidentifikasi pola-pola sosial yang muncul secara konsisten dari waktu ke waktu. Melalui keterlibatan langsung dan berkepanjangan di lapangan, peneliti dapat menangkap nuansa-nuansa sosial yang seringkali tidak bisa didapatkan melalui wawancara atau dokumentasi tertulis.

Dalam konteks penelitian ini, ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara hadir secara rutin di Desa Jatimulyo, khususnya di lokasi-lokasi yang menjadi titik sentral aktivitas Program Penghimpunan Sampah yang dijalankan oleh BUMDes Mulyo Jaya. Peneliti mengamati pelaksanaan program mulai dari proses pengumpulan sampah oleh petugas, interaksi antara petugas dan masyarakat, respons masyarakat terhadap jadwal dan sistem layanan, hingga dinamika sosial yang terjadi di seputar kegiatan tersebut. Pengamatan juga mencakup situasi di forum-forum diskusi masyarakat, rapat desa, atau kegiatan lingkungan lainnya yang relevan dengan konteks *civic engagement*.

Pengamatan dilakukan tidak hanya dalam satu kali kunjungan, melainkan secara berulang dalam kurun waktu tertentu untuk memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan pola yang stabil, bukan kebetulan sesaat. Selama pengamatan, peneliti mencatat dengan detail temuan-temuan di lapangan dalam catatan lapangan (*field notes*), termasuk perilaku, ekspresi non-verbal, kebiasaan masyarakat, serta situasi sosial yang muncul dalam konteks implementasi program. Ketekunan pengamatan ini juga dilakukan untuk menghindari bias interpretasi. Ketika peneliti hanya mengandalkan satu atau dua kali observasi, ada kemungkinan interpretasi yang dihasilkan kurang akurat karena belum memahami konteks sosial secara utuh. Namun, dengan melakukan pengamatan secara terus menerus dan dalam jangka waktu yang memadai, peneliti memiliki kesempatan untuk:

- a) Mengonfirmasi konsistensi perilaku dan pola partisipasi masyarakat dari waktu ke waktu.
- b) Menelusuri secara langsung faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kendala program.
- c) Memahami konteks sosial dan budaya lokal yang *mempengaruhi civic engagement* masyarakat desa.
- d) Membedakan antara fenomena yang bersifat rutin dan yang bersifat insidental.

Selain itu, ketekunan pengamatan memberikan ruang bagi peneliti untuk membangun kepercayaan (*rapport*) dengan informan dan masyarakat desa. Hal ini penting agar kehadiran peneliti di lapangan diterima secara sosial dan interaksi menjadi lebih alami, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih kaya dan mendalam.

Dalam praktiknya, ketekunan pengamatan dalam penelitian ini berlangsung secara fleksibel namun terencana, dengan jadwal yang disesuaikan berdasarkan waktu pelaksanaan kegiatan BUMDes maupun aktivitas masyarakat. Peneliti juga memastikan bahwa pengamatan dilakukan pada berbagai jenis kegiatan (formal maupun informal), waktu berbeda (pagi, siang, sore), dan suasana yang berbeda-beda (saat ramai dan saat sepi) untuk mendapatkan pemahaman yang holistik.

#### 4. *Audit Trail*

*Audit trail* atau jejak audit merupakan teknik yang digunakan untuk menjamin keterlacakan dan transparansi proses penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif, *audit trail* berarti mendokumentasikan secara sistematis seluruh proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, sehingga siapa pun yang membaca atau mengkaji hasil penelitian ini dapat memahami dan memverifikasi langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dari awal hingga akhir.

Audit trail sangat penting dalam memperkuat dimensi *dependability* (kebergantungan) dan *confirmability* (keterkonfirmasi) dalam validitas kualitatif. Menurut Ravitch dan Carl (2016), *audit trail* adalah kumpulan catatan yang memungkinkan pihak eksternal, seperti pembimbing atau penguji, untuk melacak logika penelitian, keputusan metodologis, serta proses interpretasi yang dilakukan oleh peneliti. Dengan *audit trail* yang baik, temuan penelitian dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

*Audit trail* dalam penelitian ini bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan bagian integral dari proses ilmiah yang bertujuan menjaga kejujuran ilmiah (*research integrity*), memastikan bahwa semua data dan temuan dapat dilacak kembali ke sumber aslinya, serta memperkuat kepercayaan terhadap proses dan hasil penelitian. Dengan audit trail yang sistematis dan lengkap, peneliti menunjukkan komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan validitas dalam studi kualitatif.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan menitikberatkan pada proses pengumpulan, reduksi, penyajian, hingga penarikan kesimpulan secara sistematis dan berkesinambungan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi Program Penghimpunan Sampah oleh BUMDes berkontribusi dalam memperkuat *civic engagement* masyarakat Desa Jatimulyo.

Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), analisis data kualitatif merupakan proses interaktif dan berulang yang terdiri dari tiga alur kegiatan utama, yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Ketiga proses ini berlangsung secara simultan selama pengumpulan data, bukan hanya dilakukan setelah data terkumpul sepenuhnya. Dalam studi kasus seperti ini, pendekatan Miles dan Huberman sangat relevan karena memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola-pola penting yang muncul dari interaksi sosial, praktik kebijakan, dan pengalaman masyarakat secara kontekstual.

### **1. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Reduksi data merupakan proses awal dalam analisis data, di mana peneliti memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mengubah data mentah yang diperoleh dari lapangan ke dalam bentuk yang lebih terorganisir dan bermakna. Dalam tahap ini, peneliti menyeleksi bagian data yang relevan dengan fokus penelitian, yakni implementasi program

penghimpunan sampah oleh BUMDes dan pengaruhnya terhadap *civic engagement* masyarakat.

Reduksi dilakukan terhadap berbagai sumber data, seperti transkrip wawancara, catatan lapangan observasi, dokumentasi kegiatan, dan refleksi harian peneliti. Proses ini melibatkan identifikasi informasi penting yang menjawab pertanyaan penelitian dan mengeliminasi data yang tidak relevan atau berulang.

Reduksi data bersifat terus-menerus selama penelitian berlangsung. Setiap data yang masuk dianalisis secara kritis untuk menemukan makna-makna kunci, pola-pola perilaku, serta indikasi perubahan sosial yang relevan dengan keterlibatan masyarakat dan peran BUMDes dalam pengelolaan sampah.

## **2. Penyajian Data (*Data Display*)**

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang terstruktur dan mudah dibaca untuk keperluan interpretasi. Penyajian data kualitatif dapat berupa narasi deskriptif, matriks tematik, diagram alur, peta konsep, atau tabel-tabel kategorisasi. Tujuannya adalah agar peneliti dapat memahami alur informasi, hubungan antar kategori, serta dinamika yang terjadi secara lebih sistematis.

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan melalui penyusunan tematik naratif berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Tiap tema utama seperti bentuk layanan penghimpunan sampah, peran kelembagaan desa, partisipasi masyarakat aktif dan pasif, serta bentuk *civic engagement* disajikan dalam subbagian tersendiri. Narasi tersebut diperkuat dengan kutipan langsung dari informan sebagai ilustrasi temuan.

Menurut Creswell & Poth (2018), penyajian data merupakan jembatan antara proses pengumpulan data dengan proses interpretasi makna. Dengan menyusun data secara sistematis dan visual, peneliti dapat lebih mudah

menemukan hubungan sebab-akibat dan dinamika sosial yang sedang berlangsung.

### **3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)**

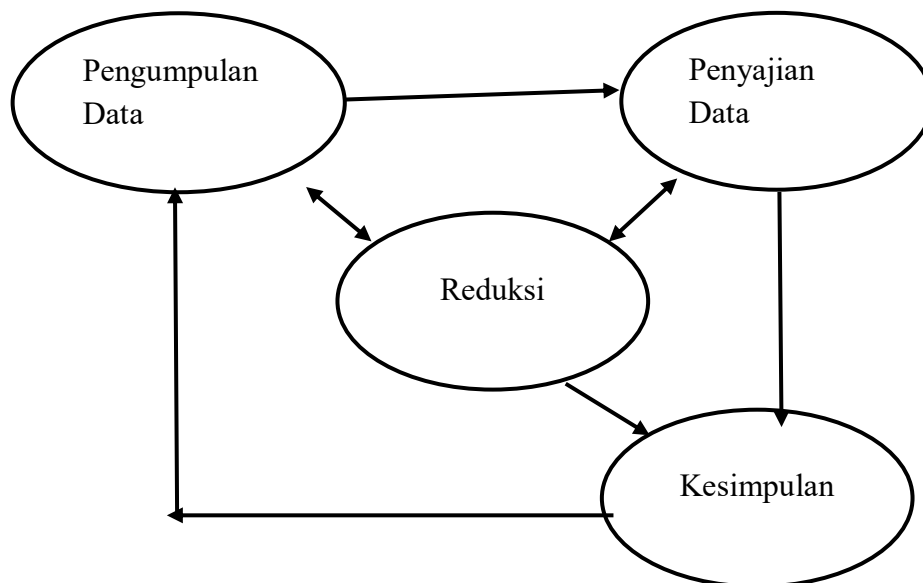
Langkah terakhir dalam analisis data adalah menarik kesimpulan dari data yang telah direduksi dan disajikan. Kesimpulan tidak serta-merta diambil pada akhir penelitian, melainkan dibangun secara bertahap seiring dengan proses interpretasi yang terus dilakukan peneliti selama pengumpulan data. Kesimpulan yang diperoleh merupakan hasil dari interpretasi temuan-temuan utama, yang mengacu pada tujuan penelitian, kerangka pikir, serta teori-teori yang relevan seperti *civic engagement*, peran kelembagaan lokal, dan dinamika partisipasi sosial. Peneliti menggunakan teknik verifikasi dengan membandingkan kesimpulan awal dengan data mentah, triangulasi sumber, dan hasil *member check* dari informan.

Menurut Miles dan Huberman (2014), validitas dalam tahap ini dijaga melalui konstanta perbandingan, yaitu menguji kesimpulan sementara dengan data lain yang relevan serta mempertimbangkan kemungkinan alternatif penjelasan. Verifikasi juga dilakukan dengan menganalisis data secara berulang dan reflektif, untuk memastikan bahwa hasil penelitian tidak didasarkan pada asumsi pribadi peneliti semata, melainkan merupakan refleksi dari kenyataan sosial yang diteliti.

Secara garis besar, proses analisis data dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Reduksi Data yaitu memilah dan menyeleksi data yang relevan.
3. Penyajian Data yaitu menyusun narasi, matriks, dan peta tematik.
4. Penarikan Kesimpulan yaitu merumuskan temuan utama secara tematik.
5. Verifikasi Data yaitu melalui triangulasi, *member check*, dan refleksi

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara simultan, mendalam, dan fleksibel, mengikuti alur reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan yang saling berkesinambungan. Proses ini memungkinkan peneliti untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana Program Penghimpunan Sampah oleh BUMDes Jatimulyo dijalankan, bagaimana masyarakat merespons, dan bagaimana dinamika tersebut mempengaruhi penguatan *civic engagement*.



Gambar 2.1 Alur analisis data menurut Miles dan Huberman (1992)

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Penghimpunan Sampah dalam penguatan *civic engagement* masyarakat oleh BUMDes Mulyo Jaya di Desa Jatimulyo, serta merujuk pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama antara lain :

1. Bentuk implementasi Program Penghimpunan Sampah oleh BUMDes Mulyo Jaya berjalan secara terstruktur dan terencana.

Program dilaksanakan melalui sistem pelayanan yang rutin, pembagian tugas yang jelas, dan dukungan kelembagaan dari pemerintah desa. Observasi dan wawancara menunjukkan bahwa layanan pengangkutan sampah berlangsung secara konsisten dan terkoordinasi meskipun terdapat keterbatasan sarana. Warga merespons positif pelayanan tersebut melalui keikutsertaan dalam berlangganan serta kepatuhan terhadap ketentuan program. Dengan demikian, tujuan penelitian pertama terpenuhi, yaitu mendeskripsikan bagaimana implementasi program berjalan dari aspek partisipasi warga, mekanisme layanan, dan dukungan kelembagaan.

2. Program Penghimpunan Sampah terbukti memperkuat *civic engagement* masyarakat Desa Jatimulyo.

Hal ini terlihat melalui meningkatnya kesadaran lingkungan, partisipasi sosial, gotong royong, hubungan sosial antarwarga, serta kepercayaan terhadap lembaga desa dan BUMDes. Interaksi berulang antara warga dan pengurus program memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif, sesuai dengan kerangka teori *civic engagement* Putnam yang menilai bahwa partisipasi berbasis komunitas dapat menciptakan modal sosial yang mendorong keterlibatan publik. Program ini menjadi sarana pembentukan



karakter kewargaan yang berangkat dari praktik keseharian masyarakat, kemudian diperkuat melalui mekanisme program yang bersifat terlembagakan.

Secara keseluruhan, program tidak hanya berperan sebagai layanan kebersihan, tetapi juga menjadi wahana efektif dalam membangun kesadaran kolektif, solidaritas sosial, dan perilaku kewargaan masyarakat desa. Program ini menunjukkan bahwa pelayanan publik berbasis komunitas dapat menjadi instrumen pembentukan budaya kewargaan yang berdampak signifikan pada kehidupan sosial masyarakat. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Penghimpunan Sampah oleh BUMDes Mulyo Jaya bukan hanya memberikan layanan kebersihan kepada masyarakat, melainkan juga berperan signifikan dalam memperkuat praktik kewargaan masyarakat Desa Jatimulyo. Program ini berhasil mendorong keterlibatan warga, meningkatkan kepedulian lingkungan, memperkuat hubungan sosial antarwarga, serta meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga desa. Dengan demikian, program dapat dinyatakan berhasil memenuhi fungsi sosialnya dan memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai model pengelolaan lingkungan yang berbasis partisipasi warga

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait agar pelaksanaan program penghimpunan sampah di Desa Jatimulyo dapat lebih optimal di masa mendatang.

1. Bagi Pemerintah Desa Jatimulyo, disarankan untuk meningkatkan peran pengawasan dan dukungan langsung terhadap kegiatan operasional BUMDes di lapangan, serta mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemeliharaan armada dan fasilitas pendukung agar pelayanan dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.
2. Bagi Pengurus BUMDes Mulyo Jaya, diharapkan memperkuat sistem komunikasi publik dengan memperluas media sosialisasi melalui media sosial, pamflet, atau papan informasi desa, sehingga seluruh masyarakat

memperoleh informasi yang jelas dan merata terkait prosedur serta manfaat program.

3. Bagi Masyarakat Desa Jatimulyo, diharapkan untuk terus berpartisipasi aktif dalam mendukung kegiatan penghimpunan sampah, tidak hanya melalui pembayaran iuran, tetapi juga dengan menjaga kebersihan lingkungan dan mengikuti kegiatan gotong royong sebagai bentuk tanggung jawab sosial bersama.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan fokus pada pengaruh program penghimpunan sampah terhadap perubahan perilaku sosial dan kesadaran lingkungan masyarakat, serta menjadikan model partisipatif BUMDes Mulyo Jaya sebagai referensi dalam pengembangan program serupa di desa lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Siregar, N. S., Matondang, A., Angelia, N., & Lubis, Y. A. 2021. Pengabdian Kepada Masyarakat Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Good governance Tingkat Desa Di Desa Aras Kabu Deli Serdang. *Pelita Masyarakat*, 3(1), 32-42.
- Adha, M. M. 2015. Memformulasikan dan Mengimplementasikan 'Civic Engagement Pada Perguruan Tinggi Untuk Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Indonesia'. Bandar Lampung: LPPM Universitas Lampung.
- Alfiansyah, R. 2021. Peran BUMDes dalam Pengelolaan Sampah dengan Insinerator dan Komposter di Desa Sumbergondo, Kota Batu. *Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains*, 2(1), 20-28.  
doi:<https://doi.org/10.55448/ems.v2i1.28>.
- Arif, D. B. 2016. Pengembangan komponen kompetensi kewargaan dalam buku teks Pendidikan K endidikan Kewarganegar ganegaraan SMP/M aan SMP/MTs. *Jurnal Civics : Media Kajian Kewarganegaraan*, 13(1), 46-55.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asiah, N., Prayasin, M. I., Safitri, E., Putri, D. A., Anisa, N., Ameldi, D., . . . Negoro, B. P. 2023. Peningkatan Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Organik Melalui Sosialisasi *Eco-Enzyme* Di Desa Kampar. *ARSY : Jurnal Aplikasi Riset Kepada Masyarakat*, 4(2), 13-21.
- Assaid, L., Marpaung, W., Rahmawati, Y., Rahmawaty, F., & Apriani, S. 2022. Membangun Sinergi Masyarakat pada Program Bank Sampah Sebagai Dampak Lingkungan Hidup oleh Bumdes di Dusun Karang Sari Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 28–32. doi:<https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.2872>
- Azizah, L. N., & Sari, L. 2023. *Civic Engagement* pada Generasi Z di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-Empiris*, 9(1), 47-57.
- Bahanan, M. 2024. Pendampingan Penguatan Manajemen Keuangan pada BUMDes Kecamatan Jambesari Darussolah Kabupaten Bondowoso. *AL-KHIDMAT : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 39-50.

- Bintarto, R. 1984. *Interaksi desa kota dan permasalahannya*. Jakarta: Jakarta Ghalia Indonesia.
- Buulolo, D. A., Ndraha, A. B., & Telaumbanua, Y. 2022. Analisis Aplikasi SISKUDES di Desa Sinar Baho Kecamatan Lahusa. *Jurnal EMBA*, 10(4), 1472-1479.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. 2018. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks: CA: SAGE Publications.
- DeVellis, R. F. 2017. *Scale Development Theory and Application (4th Edition)*. London: SAGE Publications.
- dispmid, A. den 08 08 2017. *Memahami Dan Mengerti : Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*. Hambatan Pemerintah Kabupaten Buleleng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa: <https://dispmid.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/memahami-dan-mengerti-badan-usaha-milik-desa-bumdes-45>
- Fadli, M. R. 2021. Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika : Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Faisal, M. 2019. *Pembangunan Desa dalam Perspektif Sosiohistoris*. Makassar: Garis Khatulistiwa.
- Fitrayadi, D. S., & Rahman, I. N. 2020. Keterlibatan Warga Negara (*Civic Engagement*) dalam Memutus Penyebaran Covid 19. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP*. 3, ss. 515-519. Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Ginting, S., Ginting, W. O., & Afifah, N. 2024. Pelatihan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Penguatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buluhnaman Kecamatan Munte Kabupaten Karo. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2), 204-2015.
- Halida, Aswat, B., Putri, A. A., Dharmayanti, P. A., & Jamain, R. R. 2024. *Enhancing Environmental Awareness in Early Childhood Through the Trash Tracking Game*. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha*, 12(2), 310–319.
- Hasri, & Fatihah, H. 2024. Analisis *Civic Engagement* Masyarakat Desa Lingkis dalam Menghadapi Pencemaran Lingkungan akibat Limbah Sawit di Desa Lingkis. *Jurnal Pendidikan kewarganegaraan*, 8(1), 136–142.
- Holimah, S., Wahyuni, S. A., & Suhariyono, A. 2024. *Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan*. Jember: Cerdas Ulet Kreatif.
- Iriani, N. A., Nugroho, A. P., & Tia, M. Y. 2022. Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Referensi: Jurna Ilmu Manajemen dan Akutansi*, 10(1), 27-34.
- Kapucu, N. 2011. *Social Capital and Civic Engagement*. *International Journal of Social Inquiry*, 4(1), 23-43.

- Karlos, F., Yanzi, H., & Nurmalisa, Y. 2018. Peranan Lurah Dalam Menumbuhkan Kesadaran Dalam Melestarikan Lingkungan Sungai Way Awi. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5(13), 1-15.
- Kartohadikusumo, S. 1977. *Desa: Konsep dan Perkembangannya di Indonesia*. . Jakarta: Bina Aksara.
- koentjaraningrat. 2009. *Pengantar ilmu antropologi* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Lestari, S. I. 2023. Hubungan Antara *Knowledge About Environment Issues* dan *Environmental Sensitivity* dengan *Responsible Environmental Behavior* Peserta Didik SMA Negeri di Jakarta. *IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management*, 7(2), 58-69.
- Mandanaro, L. 2015. *Civic Engagement Capacity Building: An Assessment of the Citizen Planning Academy Model of Public Outreach and Education*. *Journal of Planning Education and Research*, 35(2), 174-187.
- Maryunani. 2008. *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mentari, A., Yumanda, D., Putri, D. S., & Rohman. 2024. Kecerdasan Interpersonal Dalam Membentuk *Civic Engagement* Warga Negara Muda. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 490-496.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. 2016. *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. San Francisco: Jossey Bass.
- Metra, P. 2023. Analisis Manajemen Dana Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lolo Kecil. *Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance*, 4(2), 107-118.
- Nanggala, A., & Suryadi, K. 2021. Analisis Konsep *Service Learning* Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *PKn Progresif*, 16(1), 1-14.
- Nurhakim, I., & Anita. 2024. Implementasi Literasi Lingkungan Siswa Melalui Program Sekolah 39 SD Negeri Sungai Raya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia*, 9(1), 48-63.
- Nurmalisa, Y., Mentari, A., & Rohman. 2020. Peran Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun *Civic Conscience*. *Jurnal: Bhineka Tunggal Ika*, 7(1), 34-46.
- Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Ekonomi desa di Desa Mangki Kecamatan Cempa Kabuupateen Pinrang. 2024. *Journal AK-99*, 4(2), 268-274.
- Permana, S. 2020. *Antropologi Perdesaan dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Prasetio, A. D., Isnarmi, Fatmariza, & Muchtar, H. 2024. Penguatan *civic participation* melalui organisasi mahasiswa UNP pada Yayasan Karya Suara dan Asa Kota Padang. *JECCO : Journal of Education, Cultural and Politics*, 4(3), 610-618.

- Putra, R. P. 2019. Perilaku pro lingkungan pada pengurus organisasi mahasiswa pecinta alam. *Cognicia*, 7(3), 378-389.
- Rahmanisa, L., Adha, M. M., & Putri, D. S. 2023. Pengaruh *civic engagement* terhadap pelaksanaan kuliah kerja nyata mahasiswa. *De vice : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(6), 191-198.
- Rahmawati, H. 2016. Pengembangan Instrumen Intensi Perilaku Peduli Lingkungan pada Mahasiswa dan Faktor-Faktor Pembentuknya. *Jurnal Sains Psikologi*, 5(1), 1-43.
- Ridwlan, Z. 2014. Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pembangunan perekonomian desa. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424-440.
- Ripple, W. J., Estes, J. A., Schmitz, O. J., Constant, V., Kaylor, M. J., Lenz, A., . . . Wolf, C. 2016. *What is a Trophic Cascade? Trends in Ecology & Evolution*, 31(11), 842-849.
- Rosidina, U. 2019. Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 167-184.
- Saldaña, J., & Omasta, M. 2017. *Qualitative Research: Analyzing Life*. California: Sage Publications.
- Sandika, I., Aini, S., Simbolon, Y. K., & Hadiningrum, S. 2024. Analisis Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia. *TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 212-223.
- Saputra, D. 2025. Pengendalian Sampah Pada Tempat Penampungan Sampah (TPS)Illegal oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan (DLHK) Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Bina Widya). *UIN Suska Riau*, 1-126.
- Sari Arsyad, S. N., & Ahmad, B. 2024. Dinamika Kebijakan dan Implementasi Program Desa Maju: Studi Literatur dan Rekomendasi Kebijakan. *PAMARENDA : Public Administration and Government Journal*, 4(2), 285-295.
- Schumaker, P. 2018. Amitai Etzioni: *Communitarian Centrist and Principled Pluralist*. *The Social Science Journal*, 55(1), 6-18.
- Setiawan, A. A. 2018. Komunitas "ICK Klaten" : *Civic Engagement* sebagai Upaya Pembentukan Civil Society. *Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018* (ss. 1-10). Solo: Laboratorium PPKn FKIP UNS.
- Sianturi, F. A., Sitorus, M., & Sitio, A. S. 2024. Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengelolaan Sampah Pendekatan Kolaboratif dan Edukasi Berkelanjutan. *Keyboard : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 41-44.
- Sihombing, S. R., Hodriani, & Alhudawi, U. 2023. Memperkuat *Civic Engagement* pada Generasi Muda. *Pancasila and Civic Education Journal*, 2(2), 1-8.
- Sugihen, B. T. 1996. *Sosiologi Pedesaan Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Sugiman. 2018. Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.
- Sugiyono. 2017. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat: Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- sunarto, & Sutrisno. 2021. Internalisasi *Civic Engagement* di Perguruan Tinggi melalui program Kuliah Kerja Nyata. *JPPK : Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 57-67.
- Sutardjo. 2004. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Tanti, V. A., & Handoyo, P. 2025. Dinamika Kehidupan Sosial Masyarakat Pedesaan: Analisis dari Perspektif Sosiologi. *Jurnal On Education*, 7(2), 9733-9740.
- Tarsidi, D. Z. 2023. *Penguatan Civic Engagement Melalui Literasi Digital*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Taufiq, M. 2022. Patisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah (*Community Participation in the Establishment of Regional Regulations*). *Soedirman Law Review*, 3(4), 549-558.
- Timario, R. R., & Lomibao, L. S. 2023. *Exploring the Lived Experiences of College Students with Flexible Learning in Mathematics: A Phenomenological Study*. *American Journal of Educational Research*, 11(5), 297-302.
- Tjokrowinoto, M. 2007. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Utami, K. S., Tripalupi, L. E., & Meitriana, M. A. 2019. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Ditinjau melalui Kewirausahaan Sosial. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 11(2), 498-508.
- Utami, K., & Surtikanti, R. H. 2023. *Analysis of students' environmental literacy at senior high school 10 palembang on environmental pollution material*. *JPBIO : Jurnal Pendidikan Biologi*, 8(2), 368-383.
- Wilson, D. C., Rodic, L., Scheinberg, A., Velis, C. A., & Alabaster, G. 2012. *Comparative analysis of solid waste management in 20 cities*. *Sage Journal*, 30(3), 237-254.
- Yamane, T. 1967. *Statistics: An Introductory Analysis (2nd ed.)*. New York: Harper and Row.
- Yunita, K., Mustika, I. G., Rusmita, S., Prihartini, D., & Mustakim, U. 2019. Konsep Pendirian dan Pengembangan Bumdes. *Prosiding SATIESP 2019*, 171-177.
- Yusup, M., Kistiono, & Ariska, M. 2019. Strategi dalam *Green Education* untuk Melahirkan Manusia dengan *Green Behavior*. *Jurnal Inovasi dan Pembelajaran Fisika (JIPF)*, 1(10), 203-210.